



SKRIPSI
PERAN AKBAR TANDJUNG DALAM MENYELAMATKAN
PARTAI GOLKAR PADA MASA KRISIS POLITIK PADA
TAHUN 1998-1999

Oleh
Mega Ayu Lestari
NIM 090110301022

JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS JEMBER

2016



**PERAN AKBAR TANDJUNG DALAM MENYELAMATKAN
PARTAI GOLKAR PADA MASA KRISIS POLITIK PADA
TAHUN 1998-1999**

SKRIPSI

Skripsi diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelar sarjana sastra

Oleh

Mega Ayu Lestari

NIM 090110301022

JURUSAN ILMU SEJARAH

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Ayu Lestari

NIM : 090110301022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:Peran Akbar Tandjung Dalam Menyelamatkan Partai Golkar Pada Masa Krisis Politik Pada Tahun 1998-1999”adalah benar-benar hasil karya ilmiah sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,14Maret 2016

Yang Menyatakan,

:

Mega Ayu Lestari

090110301022

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diajukan oleh :

Dosen Pembimbing,

Sunarlan S.S., M.Si.

NIP. 196910112006041001

PENGESAHAN

Diterima dan disahkan oleh
Panitia Penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Jember
Pada hari : Senin
Tanggal : 14 Maret 2016

Ketua

Sunarlan S.S.,M.Si

NIP.196910112006041001

:

Penguji 1,

Penguji 2,

Drs. IG.Krisnadi M.Hum

NIP. 196202281989021001

Dr. Sri Ana Handayani M.Si

NIP. 196009191986022001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember

Drs. Hairus Salikin, M.Ed

NIP 196310151989021001

PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan harapan dan perjuangan sebagai bagian perjalanan hidup dan menjadi bagian ibadah kepada Allah S.W.T. Dengan bangga skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Allah S.W.T atas segala riski dan hidayah-Nya yang telah diberikan, serta junjungan kepada Nabi Muhammad S.A.W.
2. Keluargaku Ayahanda Slamet dan Ibunda tercinta Sulika yang tak henti-hentinya memberikan limpahan do'a, dukungan semangat cinta kasih yang senantiasa mengiringi setiap langkah demi keberhasilan, serta menyediakan segala kemudahan. Semoga Allah S.W.T memberikan hidayah-Nya kepada penulis agar mampu membalas kebaikannya.
3. Kakakku tercinta Firdaus Moch Candra dan kedua adikku Gunawan Wibisono dan Agus Leo Purnomo yang telah memberikan dorongan dan semangat selama ini.
4. Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Cabang Jember di Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan tumpangan, semangat, dan nasehatnya.
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya terutama Bapak Sunarlan S.S., M.Si., selaku dosen pembimbing, Bapak Drs. IG Krisnadi M.Hum., selaku dosen penguji 1, dan Ibu Dr. Sri Ana Handayani M.Si., selaku penguji II.
6. Kepada Bapak dan Ibu Guru yang senantiasa mengajariku dengan ketelatenan dan kasih sayang dari mulai TK (Taman Kanak-Kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas)
7. Almamater Fakultas Sastra Universitas Jember tercinta.
8. Kepada organisasiku HMI Komisariat Sastra Cabang Jember yang telah memberikan tempat bagiku untuk belajar organisasi.
9. Seluruh teman-teman baikku maupun sejarah angkatan 2009 yang telah memberikan kontribusi, dukungan, ide yang inspiratif, dan kritikan yang konstruktif. Terima kasih atas semua kontribusi yang kalian berikan.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:”Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Terjemahan QS. Al-Mujadilah 11)

“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan. Yakin, Usaha, Sampai ”
(Mega Ayu Lestari)

PRAKATA

Puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dalam kesabaran dan keteguhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Akbar Tandjung Dalam Menyelamatkan Partai Golkar Pada Masa Krisis Politik Pada Tahun 1998-1999” Hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada;

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., sebagai dekan fakultas sastra Universitas Jember,
2. Dr. Nawiyanto, M.A.,Ph.D.,Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember,
3. Sunarlan S.S.,M.Si., sebagai dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mengarahkan dan membimbing dengan penuh ketelitian dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Drs. IG. Krisnadi M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis,
4. Bapak dan Ibu dosen sejarah fakultas sastra, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini,
5. Petugas perpustakaan Fakultas Sastra dan perpustakaan pusat yang telah membantu dalam penyediaan buku-buku yang dibutuhkan,
6. Kepada Ayahanda dan Ibunda, kakaku dan kedua adikku
7. Teman-teman seangkatan sejarah 2009, Nailul, Heni, Cici, Afif, Daud, Galuh, Agus, Imam, Ulil, Dea, Subur, Eko, Imron, dan Zaenal yang mewarnai hidupku saat kuliah, memberikan bantuan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada HMI Komisariat Sastra dan semua saudara seperjuangan yang saya banggakan, Ilham Wardana, Hermanto, Wisnu, Budi, Elok, Irfan, Jefri, Indra,

Wulan, Zizah dll, terimakasih atas semua pengalaman dan pelajaran yang diberikan.

9. Segenap informan yang telah terlibat wawancara dalam menyelesaikan skripsi ini,
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

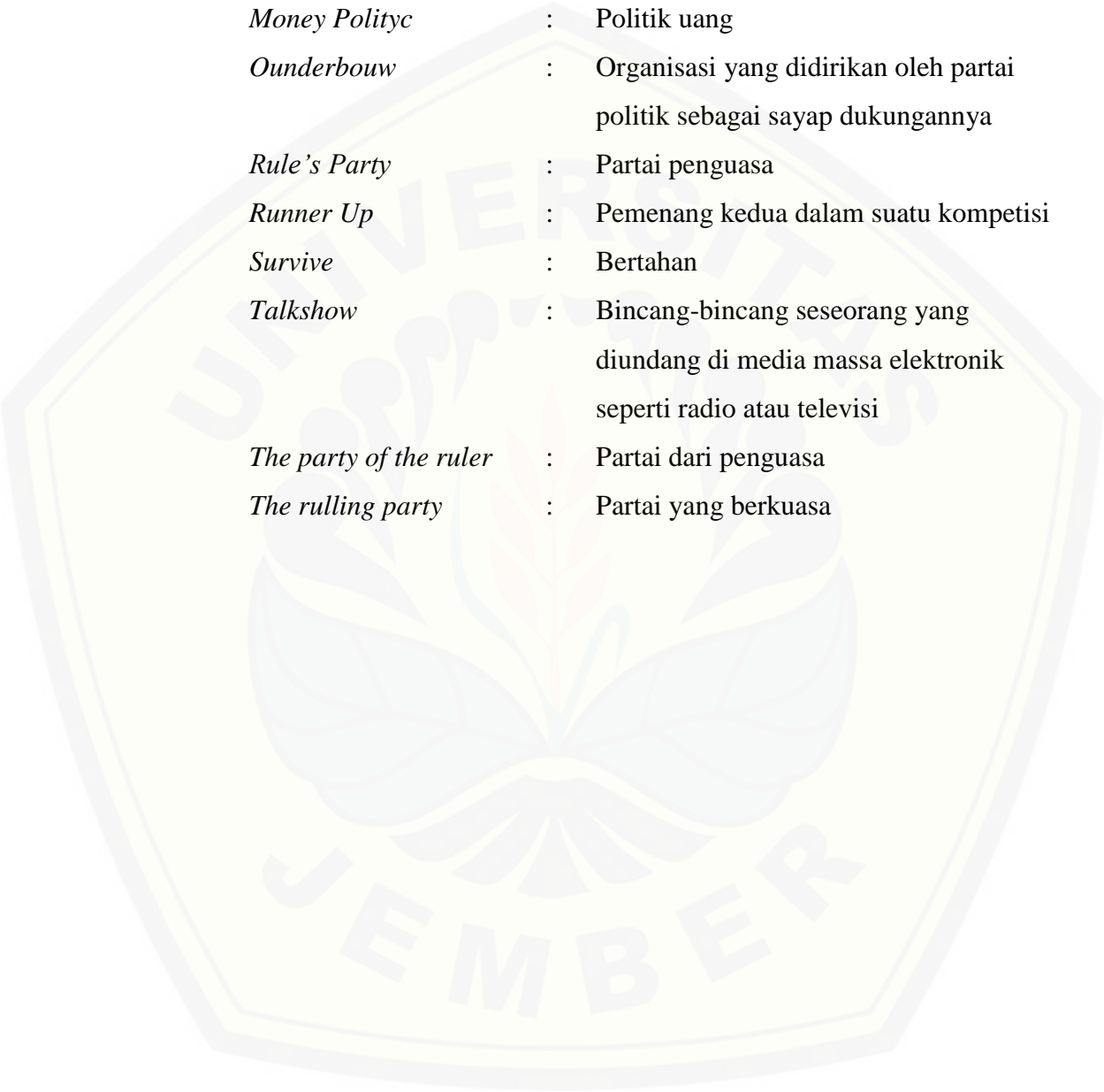
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan pada khususnya dalam pengembangan ilmu sejarah.

Jember, 14 Maret 2016

Penulis

Mega Ayu Lestari

DAFTAR ISTILAH



<i>Money Polityc</i>	:	Politik uang
<i>Ounderbouw</i>	:	Organisasi yang didirikan oleh partai politik sebagai sayap dukungannya
<i>Rule's Party</i>	:	Partai penguasa
<i>Runner Up</i>	:	Pemenang kedua dalam suatu kompetisi
<i>Survive</i>	:	Bertahan
<i>Talkshow</i>	:	Bincang-bincang seseorang yang diundang di media massa elektronik seperti radio atau televisi
<i>The party of the ruler</i>	:	Partai dari penguasa
<i>The rulling party</i>	:	Partai yang berkuasa

DAFTAR ISI

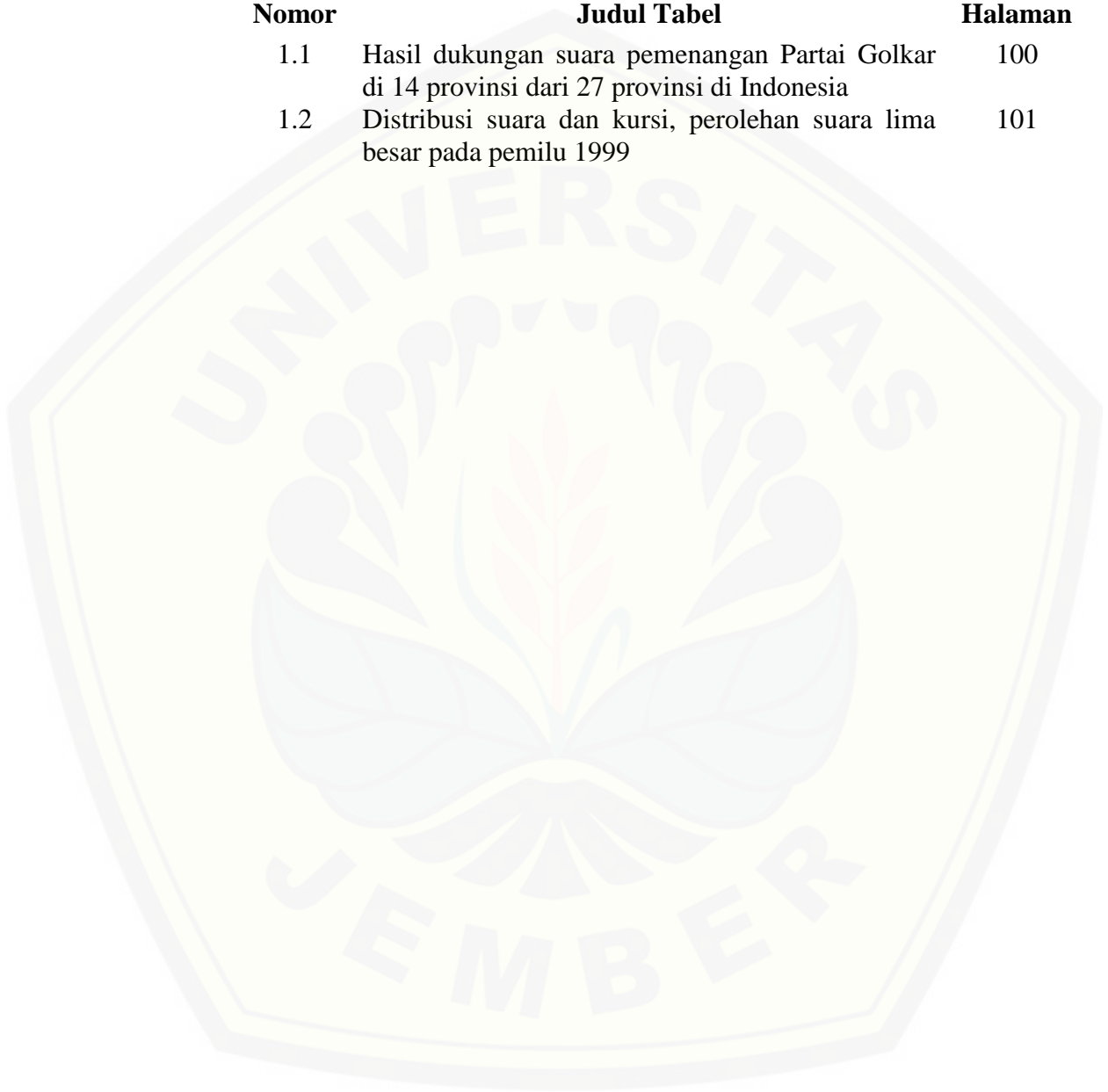
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTO	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISTILAH	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
RINGKASAN	xxiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3. 1 Tujuan	16
1.3. 2 Manfaat	17

1.4 Ruang Lingkup.....	17
1.5 Tinjauan Pustaka	18
1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori	22
1.7 Metode Penelitian.....	28
1.8 Sistematika Penulisan.....	30
BAB.2 Sejarah Dan Dinamika Politik Golkar.....	32
2.1 Kelahiran Sekber Golkar Pada Era Demokrasi Terpimpin.....	33
2.2 Golkar Pada Masa Orde Baru.....	35
2.2.1 Eksistensi Golkar.....	39
2.2.2 Golkar, Harmoko, Dan Detik-Detik Lengsernya Soeharto ...	41
2.3 Golkar Awal Reformasi.....	44
2.3.1 Menuju Munaslub Golkar : Detik-Detik Terpilihnya Akbar Tandjung.....	47
2.3.2 Kemenangan Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Golkar	51
2.4 Metamorfosis Golkar.....	52
2.4.1 Perumusan RUU Politik.....	56
2.4.2 Tantangan Golkar Setelah Reformasi.....	62
BAB. 3 Golkar Baru Dan Pemilu Pada Pasca Reformasi.....	66
3.1 Langkah Akbar Tandjung Menyelamatkan Golkar Dengan Paradigma Baru	67
3.2 Tantangan Partai Golkar Menghadapi Pemilu 1999.....	72
3.3 Strategi Politik Partai Golkar Menghadapi Pemilu 1999	81
3.3.1 Langkah Akbar Tandjung Dalam Pembentukan Sayap Pendukung Golkar.....	82
3.3.2 Langkah Partai Golkar Dalam Menguasai Opini Di Media	

Sebagai Strategi Memperoleh Simpati Masyarakat Pada Pemilu 1999	85
3.3.3 Pengaruh Ketokohan Akbar Tandjung.....	89
3.3.4 Strategi Akbar Tandjung Dalam Konsolidasi Nasional Untuk Membangun Golkar Baru.....	91
3.3.5 Strategi Partai Golkar Dalam Mendulang Suara Pada basis Massa NU	94
3.4 Partai Golkar Dan Pemilu 1999.....	97
BAB 4 Kesimpulan	102
Daftar Pustaka.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109

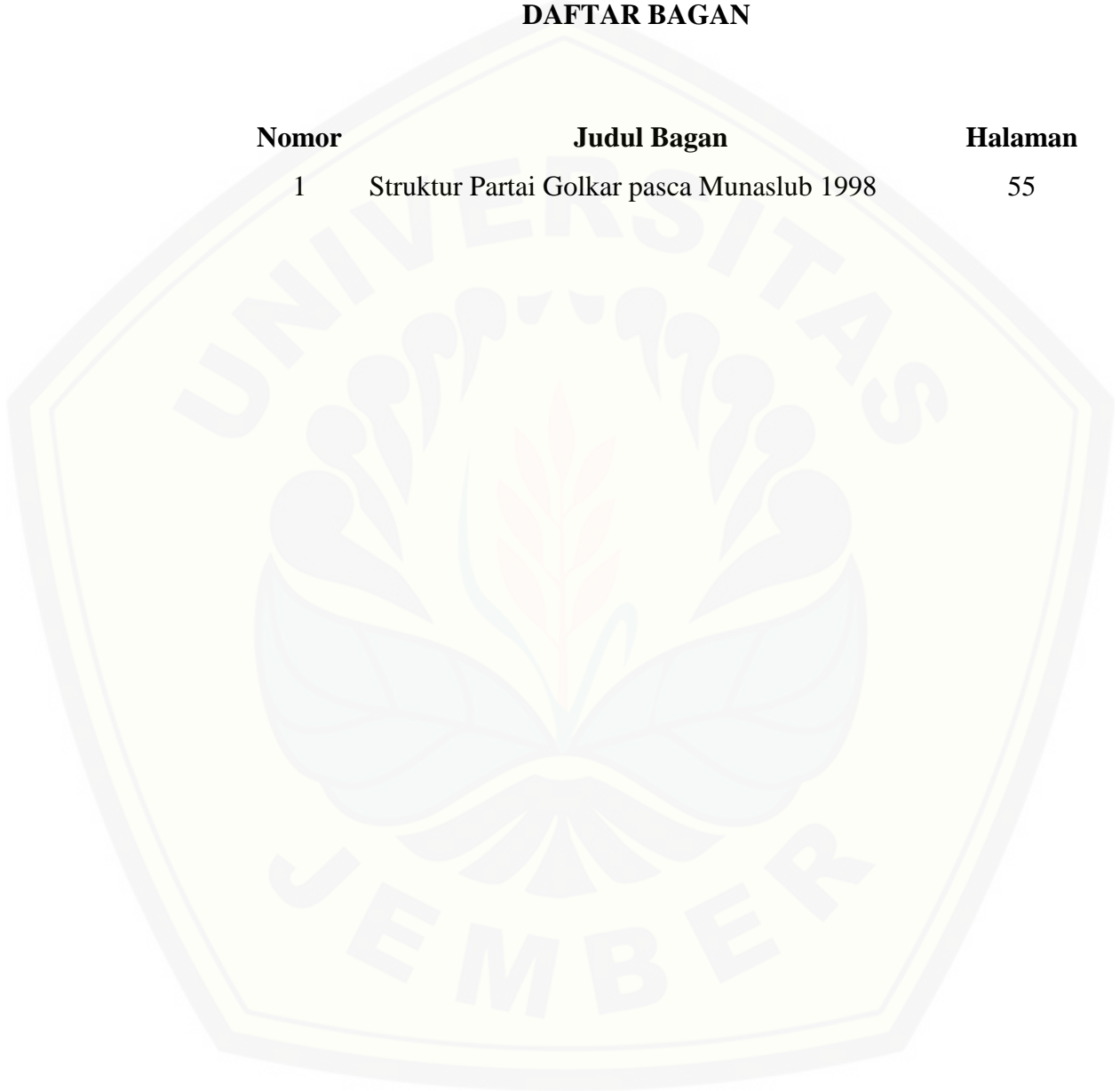
DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.1	Hasil dukungan suara pemenang Partai Golkar di 14 provinsi dari 27 provinsi di Indonesia	100
1.2	Distribusi suara dan kursi, perolehan suara lima besar pada pemilu 1999	101



DAFTAR BAGAN

Nomor	Judul Bagan	Halaman
1	Struktur Partai Golkar pasca Munaslub 1998	55



DAFTAR SINGKATAN

ABG	:	ABRI, Birokrasi, Golkar.
ABRI	:	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD/ART	:	Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
AMPG	:	Angkatan Muda Partai Golkar
AMPI	:	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia
ASEAN	:	Asociation Of Southeast Asian Nations
Babinsa	:	Bintara Pembina Desa
BOM	:	Barisan Oposisi Mahasiswa
BPPK	:	Badan Pembina Potensi Karyawan
DPC	:	Dewan Pimpinan Cabang
DPP	:	Dewan Pimpinan Pusat
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FBSI	:	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
Forkot	:	Forum Kota
FPP	:	Fraksi Partai Pembangunan
Gakari	:	Gerakan Karyawan Republik Indonesia
GBHN	:	Garis Besar Haluan Negara
GMNI	:	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Golkar	:	Golongan Karya
Guppi	:	Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia



Hankam	:	Pertahanan dan Keamanan
HMI	:	Himpunan Mahasiswa Islam
HNSI	:	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
HIPMI	:	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
HKTI	:	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
HWK	:	Himpunan Wanita Karya
ICMI	:	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IMF	:	International Moneter Found
IMM	:	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
IPKI	:	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
KBA	:	Keluarga Besar ABRI
Kadin	:	Kamar Dagang Indonesia
KAMI	:	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
Kahmi	:	Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
Kino	:	Kelompok Induk Organisasi
KKN	:	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KNPI	:	Komite Nasional Pemuda Indonesia
Koramil	:	Komando Rayon Militer
Korpri	:	Korp Pegawai Republik Indonesia
Kosgoro	:	Koperasi Simpan Gotong Royong
KPPG	:	Kesatuan Perempuan Partai Golkar
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk



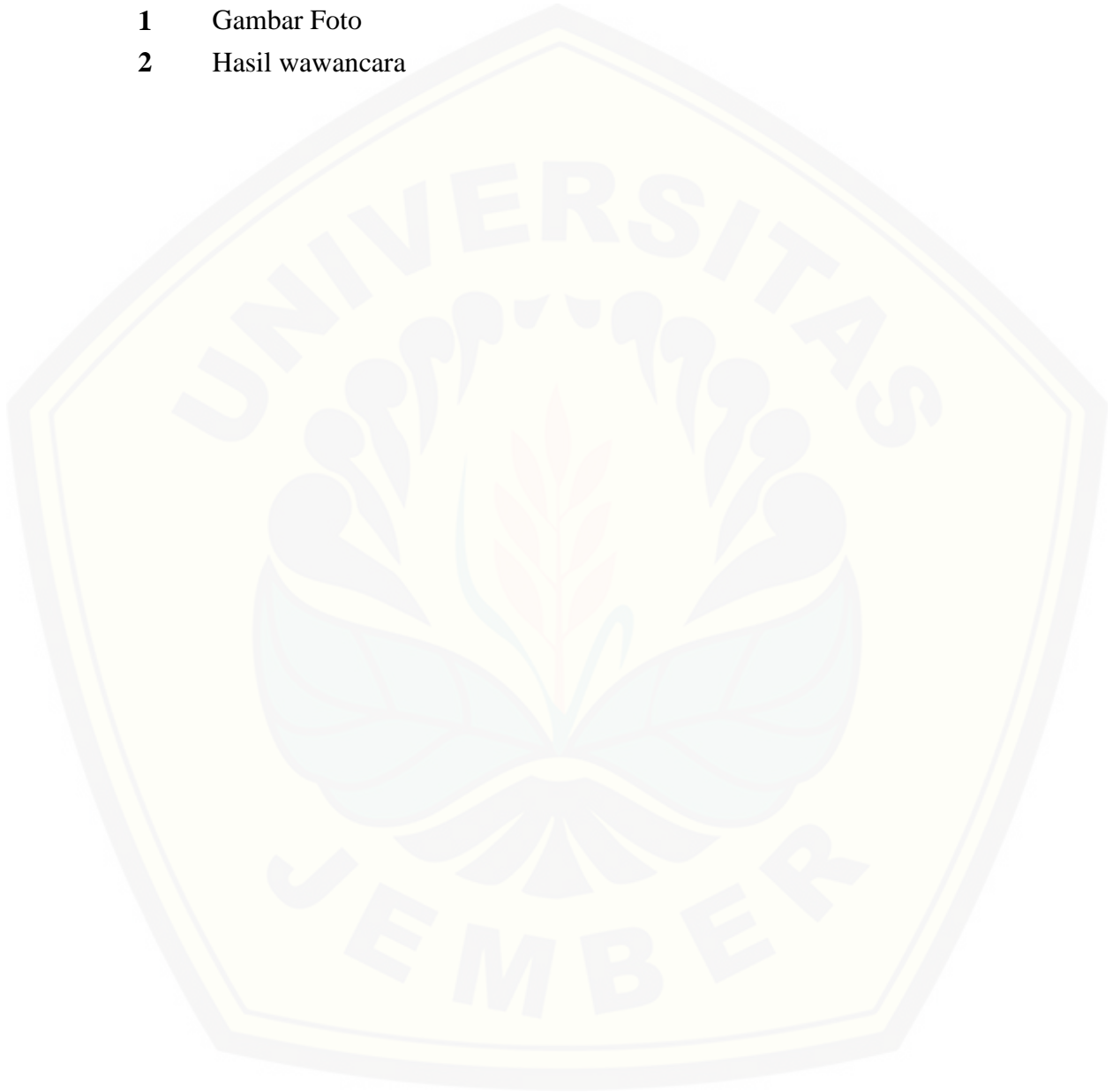
KUD	:	Koperasi Unit Desa
Lekra	:	Lembaga Kesenian Rakyat
LPU	:	Lembaga Pengawas Pemilu
MDI	:	Majelis Dakwah Indonesia
Mendagri	:	Menteri Dalam Negeri
Mensesneg	:	Menteri Sekertaris Negara
MKGR	:	Musyawah Keluarga Gotong Royong
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Mubeslub	:	Musyawahar Besar Luar Biasa
Mukernas	:	Musyawahar Kerja Nasional
Munaslub	:	Musyawahar Nasional Luar Biasa
Murba	:	Musyawahar Rakyat Banyak
Nasakom	:	Nasionalis, Agamis, dan komunis
NU	:	Nahdhatul Ulama
PAN	:	Partai Amanat Nasional
Pangdam	:	Panglima Daerah Militer
Panwaslu	:	Panitia Pengawas Pemilu
Parkindo	:	Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia
Parmusi	:	Partai Muslimin Indonesia
PDI	:	Partai Demokrasi Indonesia



PDI-P	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDR	:	Partai Daulat Rakyat
Pemilu	:	Pemilihan Umum
PKB	:	Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	:	Partai Komunis Indonesia
PKK	:	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKPB	:	Partai Karya Peduli Bangsa
PKP	:	Partai Keadilan dan Persatuan
PMII	:	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PNI	:	Partai Nasionalis Indonesia
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PPP	:	Partai Persatuan dan Pembangunan
PSII	:	Partai Syarikat Islam Indonesia
P3PKU	:	Panitia Persiapan Pembentukan Komite Pemilu
Rapimnas	:	Rapat Pimpinan Nasional
RUU	:	Rancangan Undang-undang
Sekber	:	Sekretaris Bersama
SOBSI	:	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SOKSI	:	Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia
SUAD	:	Staf Umum Angkatan Darat
Supersemar	:	Surat Perintah Sebelas Maret
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

- 1** Gambar Foto
- 2** Hasil wawancara



ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang peran Akbar Tandjung dalam menyelamatkan Partai Golkar pada masa krisis politik pada tahun 1998-1999, yang dikaji dari aspek politik. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui bagaimana Akbar Tandjung membawa Partai Golkar berhasil sebagai pemenang kedua dalam kompetisi Pemilu 1999 sehingga partainya selamat dari ancaman pembubaran dan berbagai macam intimidasi politik pasca reformasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik, yaitu menyangkut tentang kekuasaan (politik praktis) dan mempelajari kehidupan masyarakat dengan berbagai situasi politik. Teori yang dipakai adalah teori Miriam Budiardjo dan Maurice Duverger yang meliputi pengertian partai politik, fungsi partai politik, klasifikasi partai politik, dan tujuan partai politik. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yang terdiri dari, heuristik, kritik sumber (sumber dari dalam dan sumber dari luar), interpretasi dan historiografi. Terpilihnya Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Golkar hasil dari Munaslub pada pasca reformasi, merupakan tantangan yang berat bagi Akbar Tandjung untuk mempertahankan eksistensi Partai Golkar dari tuntutan publik yang mengatasnamakan kaum reformasi yang terus menyuarakan pembubaran terhadap Golkar. Pada masa ini juga Partai Golkar harus kehilangan dua pilar penyangga utamanya yaitu Birokrasi dan militer, karena kedua kelompok ini merupakan tonggak kemenangan Golkar setiap Pemilu selama rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto. Pasca reformasi pembaharuan dibidang politik diberlakukan untuk mempersiapkan Pemilu 1999, oleh karena itu Akbar Tandjung melakukan perubahan kebijakan partainya untuk strategi kemenangan Pemilu 1999. Salah satu perubahan yang paling penting adalah mengganti ideologi lama menjadi ideology baru yaitu yang disebut paradigma baru. Maka dengan inilah para aktivis atau masyarakat mulai tertarik untuk masuk menjadi kader partai tersebut, masuknya para pimpinan dan aktivis organisasi massa reformasi yang sebelumnya menghujat Golkar karena paradigma lama, bersama paradigma baru

Partai Golkar gencar mensosialisasikannya saat kampanye Pemilu 1999. Straregi paradigma baru oleh Akbar Tandjung ini merupakan salah satu factor Partai Golkar mendulang suara pada Pemilu 1999 dan berhasil menempati kemenangan ke-dua setelah PDI-Perjuangan. Hasil perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 1999 membuat Partai Golkar mampu untuk *survive* dan tetap eksis sampai sekarang.

Kata kunci : Akbar Tandjung, Partai Golkar, Pemilu 1999, Paradigma Baru



ABSTRACT

This study discusses the role of Akbar Tandjung in saving the Golkar Party in the political crisis phase on 1998-1999, which is examined in light of political aspect. The purpose of the study is to find out how Akbar Tandjung made a success of the Golkar Party to be the second winner in the 1999 election competition so as the party survived of the threat of dissolution and various post-reform political intimidations. The study uses political approach, namely, power (political practise) and scrutinized the lives of people from different political situation. The study employs the theory of Miriam Budiardjo and Maurice Duverger covering the definition of political parties, the function of political party, the classification of political parties and the objective of political party. The method is historical method, consisting heuristics, source criticism (intern and extern), interpretation and historiography. The elected Akbar Tandjung as the chief of Golkar Party in Munaslub (National conference) of the post-reform, was a tough challenge for Akbar Tandjung to maintain the existence of Golkar Party from public demand which called them a reformed community to disperse Golkar Party. At the time, Golkar Party lost two main pillars, namely bureaucracy and military, because both these groups are milestone victory for Golkar in every election during the New Order regime to maintain the power of Soeharto. The renewal in political field is applied to prepare the 1999 election in the post-reform, therefore, Akbar Tandjung made policy changes on the strategy of his party to win the 1999 election. One of the important alteration is that to change the older ideology into the newer ideology by what so called new paradigm. Golkar Party with new paradigm give a new chance and opportunity to the activist and community which formerly against Golkar Party in case of the old paradigm. This is what make the interest of entering Golkar Party to be the cadres, the entering of leaders and activists of reformed organization which formerly against Golkar because of the continuing of the New Order, by the new paradigm of the Golkar Party they have spirit to socialize it at 1998 campaign election. The strategy of new paradigm by Akbar Tandjung is one of the factors of the Golkar Party to rise the vote in 1999 election and successfully won the second position after Democratic Indonesia party of struggle (PDI). The result of the vote of Golkar Party in 1999 election made survives and still exists until now on.

Keywords: Akbar Tandjung, Golkar Party, the 1999 election, The New Paradigm

RINGKASAN

Peran Akbar Tandjung Dalam Menyelamatkan Partai Golkar Pada Masa Krisis Politik Pada Tahun 1998-1999

Pasca reformasi Partai Golkar mengalami intimidasi politik karena merupakan partai penyokong utama Orde Baru, dan dianggap bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Guna memperbaiki kondisi internal Golkar menghadapi perubahan politik, Pengurus DPP Partai Golkar segera melakukan reformasi Golkar yaitu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munalub) pada tanggal 9-11 Juli 1998 di Jakarta. Ide Munaslub sebenarnya sebagai rancangan untuk meminta Harmoko mundur dari Ketua Umum Golkar. Hal ini sebelumnya telah diwacanakan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dihadiri oleh 27 DPD, permintaan beberapa DPD Golkar yang meminta untuk segera Munas diantaranya didukung oleh 23 DPD dan 4 DPD lainnya memilih abstain. Tudingan ketua DPD-DPD antar daerah terhadap Harmoko yang menganggapnya sebagai kesalahan fatal, padahal seharusnya sesuai mekanisme organisasi ia melakukan komunikasi atau pengarahan ke daerah-daerah untuk mengeluarkan keputusan apapun sebagai sikap organisasi menghadapi tuntutan masyarakat.

Kesepakatan Munaslub akhirnya dipercepat yaitu tanggal 9-11 Juli 1998, Akbar Tandjung menyalonkan dirinya sebagai kandidat Ketua Umum Golkar dari faksi sipil Golkar, lalu dari faksi ABRI yang berada di Golkar yaitu Edy Sudrajat. Hasil dari Munaslub tersebut terpilihlah Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum

Golkar mengalahkan Edy Sudrajat, kemenangan Akbar Tandjung ini diharapkan disambut hangat oleh pengurus Golkar di daerah-daerah dan mereka berharap, Golkar akan lebih mencerminkan suasana organisasi politik modern dan demokratis. Selain itu diharapkan pula bisa membawa Golkar *survive* dalam menghadapi Pemilu di era sistem multipartai, oleh karena itu untuk memperbaiki citra Golkar, kebijakan mengenai aturan Pemilu pun berubah dan Golkar mendeklarasikan sebagai partai politik pada tanggal 7 Maret 1999. Menghadapi kontestasi Pemilu 1999 Akbar Tandjung melakukan beberapa langkah-langkah strategisnya. Langkah pertama yaitu mengganti ideologi partai yang disebut Golkar baru dengan paradigma baru, selain mengganti ideologi baru Partai Golkar sebagai bentuk pencitraan kembali partainya, Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum dari partai yang pernah berkuasa selama 30 tahun tentunya mempunyai jaringan di segala lini untuk mempersiapkan kompetisi dalam pelaksanaan Pemilu 1999.

Latar belakang karir politik Akbar Tandjung di Partai Golkar yang dirintis dari seorang kader biasa sampai menjadi salah satu dari Dewan Pimpinan Pusat, tentunya mempunyai langkah politik dalam pembentukan sayap pendukung Golkar. ketokohan Akbar Tandjung di organisasi ekstra mahasiswa yang bernama HMI juga menentukan langkah politik Akbar Tandjung, karena digunakan untuk mengerahkan massa HMI untuk mendukung kemenangan Partai Golkar yang dikawal oleh kader-kader muda HMI di dalam Partai Golkar. Kesantunan dan kesabaran Akbar Tandjung dalam menghadapi hujatan, cercaan dan intimidasi politik oleh lawan-lawan politiknya merupakan salah satu strategi yang dimanfaatkan oleh Akbar Tandjung dan kader-kader Partai Golkar yang selanjutnya di muat di media massa terutama media cetak sebagai strategi memperoleh simpati masyarakat pada Pemilu 1999. Akbar Tandjung merangkul semua kalangan untuk membantu kemenangan Partai Golkar pada kemenangan Pemilu 1999, yaitu dari organisasi massa Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Melalui latar belakang tersebut kajian skripsi ini bermaksud untuk mendiskripsikan Peran Akbar Tandjung Dalam Menyelamatkan Partai Golkar Pada

Massa Krisis Politik Pada Tahun 1998-1999. Penulisan skripsi ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangsih wacana bagi pendukung dan simpatisan Partai Golkar terhadap proses wacana kinerja partai, memperkaya pemahaman mengenai keberadaan partai politik di Indonesia dan memberi kontribusi terhadap pemahaman ilmu sejarah khususnya mengenai politik kepartaian dan dapat dijadikan sumber tulisan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian skripsi ini menggunakan metode sejarah melalui empat tahap meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kajian skripsi ini selain menggunakan studi pustaka, penulis juga melakukan studi lapangan. Meski rezim Orde Baru telah runtuh, memasuki era reformasi keberadaan Partai Golkar dan peran strategisnya dalam hal kebijakan pemerintah masih dipercaya oleh masyarakat. Akbar Tandjung mempertahankan Partai Golkar dalam menghadapi kontestasi Pemilu 1999 dan menjadikan Partai Golkar masih dipercaya oleh masyarakat dengan menjadi pemenang kedua di Pemilu 1999 setelah PDI-Perjuangan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada bulan Maret 1967, MPRS mengadakan Sidang Istimewa¹ dengan acara tunggal membahas keterlibatan Presiden Ir. Soekarno dalam Gerakan separatis PKI.² Sidang Istimewa ini menghasilkan keputusan penting yang akhirnya di bawa dalam Sidang Umum³ dan menghasilkan keputusan berupa ketetapan MPRS No.XXXIII/1967 tentang pemberhentian Presiden Ir. Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI. Selain itu Ir. Soekarno, dilarang melakukan kegiatan politik sampai Pemilu 1971. Selanjutnya berdasarkan

¹ Sidang Istimewa adalah Sidang yang diselenggarakan MPR ketika pada saat situasi dan kondisi negara genting atau sangat penting yang tujuannya adalah MPR meminta laporan pertanggungjawaban ke Presiden tentang pelaksanaan pemerintahannya. Jika laporan pertanggungjawaban Presiden tidak diterima oleh MPR maka Presiden jatuh.

² Kuskrido Ambardhi, *Mengungkap Politik Kartel : Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* ,(Jakarta ; Pustaka Gramedia , 2009), hlm.74.

³ Sidang Umum adalah sidang yang dilaksanakan MPR berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, termasuk misalnya melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

ketetapan MPRS No. XIII/1966 tentang pembentukan kabinet Ampera dan Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden yang didukung dengan terbitnya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966).⁴ Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden dan ditugasi mengusut tuntas peristiwa 30 September 1965. Berdasarkan kebijakan itu Pejabat Presiden Soeharto membentuk badan kehakiman militer untuk mengusut dan menyelidiki peristiwa tersebut, dan kemudian Soeharto membubarkan PKI dan Ir. Soekarno pun dituduh terlibat, sehingga berdasarkan pasal 6 MPRS XIII/1967 secara tegas menyatakan: “menetapkan penyelesaian hukum yang menyangkut Ir. Soekarno dilakukan menurut ketentuan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden”.⁵

Pada awal pemerintahan Orde Baru, Soeharto melakukan penataan di segala bidang yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Guna mengukuhkan rezim Orde Baru maka Soeharto terlebih dahulu melakukan pembersihan dan penertiban besar-besaran terhadap mental Orde Lama, di bidang politik misalnya seluruh sektor lembaga kenegaraan atau pemerintahan dari pusat sampai ke tingkat daerah mengubah arah kebijakan, asas, dan tujuan berdasarkan Pancasila yang sebelumnya pada masa Orde Lama mengarah pada kebijakan Manifesto Politik atau yang disebut Manipol Usdek.⁶ Soeharto membersihkan hal-hal yang dianggap berbau ideologi komunis seperti memutuskan hubungan diplomatik Indonesia dengan China, dan membenci orang-orang Tionghoa karena dianggap sebagai

⁴ Supersemar sebagai alat legitimasi Soeharto yang ditunjuk oleh Presiden Sukarno untuk menggantikan dirinya sementara, akan tetapi Supersemar ini masih dalam perdebatan karena terdapat berbagai versi Supersemar, hingga saat ini masih dalam perdebatan tentang keaslian surat perintah tersebut.

⁵ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer- Study Tentang Budaya Politik*, (Jakarta ; LP3ES, 1992), hlm.80.

⁶ Manifesto Politik Usdek yaitu haluan negara yang mengacu pada Undang – Undang dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

pembawa unsur komunisme,⁷ penangkapan menteri yang dekat dengan Soekarno, yaitu Dr. Soebandrio, Dr. Chaerul Saleh, Ir Soerahman, Oei Tjoe Tjat S.H, Mayjen Ahmadi, Sutomo Martopradhopo, dan lain lain. Begitupun orang-orang yang ada dalam Sekber Golkar yang dianggap dekat dengan mantan Presiden Soekarno, termasuk pendiri – pendiri Golkar yaitu J.K Tumakaka, Imam Pratihnyo, dan Djuhartono ditangkap dan diberhentikan.

Soeharto memberikan peran Ganda kepada ABRI berupa doktrin Dwifungsikarena ABRI telah menjalankan kedua fungsinya yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sosial politik bergerak secara bersamaan dalam dua lingkungan kehidupan politik yaitu dalam kehidupan politik di lingkungan pemerintahan (supra struktur politik) dan dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat (infra struktur politik). Kebijakan Soeharto tentang pemberian peran ganda berupa doktrin Dwifungsi ABRI ditindaklanjuti berupa perubahan UU No.16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dimana jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 yang terdiri dari 360 orang dipilih melalui Pemilu, dan 100 orang diangkat langsung oleh Presiden.⁸ Dengan kekuasaan kebijakan itu, Presiden Soeharto mengangkat 75 orang dari ABRI dan 25 orang dari Golkar, sehingga kekuatan ABRI dan Golkar semakin konkret.⁹

Dibidang ekonomi, Rezim Orde Baru mengambil langkah menunda diadakannya Pemilu pada Januari 1968 dengan alasan permasalahan teknis, menunggu kestabilan politik. Penundaan ini dimanfaatkan Rezim Orde Baru untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui program REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dari 1966 hingga 1971 untuk memperoleh simpati masyarakat, karena Soeharto tidak menginginkan memimpin Indonesia

⁷ Hari Satria, *49 Tahun Mengenang Partai Komunis Indonesia*, (Depok; Independen Press, 2009), hlm.32.

⁸Sebelumnya UU No.80 Tahun 1958, Pasal 2 ayat (1), berisi tentang posisi ABRI sebagai golongan fungsional. Di awal Orde baru landasan konstitusionalnya ditambah dengan keluarnya TAP MPR UU No.16 Tahun 1969 yang menjamin kelangsungan kekarya anggota ABRI. Lihat Nasution tentang *Jalan Tengah ABRI*. (Bandung; Mizan, 2008), hlm.62.

⁹Leo Suryadinata, *Op.cit.*, hlm.40.

dengan corak militeristik secara langsung melainkan terlebih dahulu mendapatkan legitimasi melalui Pemilu, sebab itu ABRI, memberikan dukungan kepada Golkar untuk menjadi organisasi yang besar dan kuat yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan politik Rezim Orde Baru, terutama dalam kerangka mendukung suksesnya pembangunan ekonomi. Maka dari itu Soeharto, membangun perekonomian Indonesia dengan strategi ekonomi liberal.¹⁰

Dibidang Sosial dan Budaya Rezim Orde Baru melarang penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa, serta larangan perayaan keagamaan orang-orang Tionghoa, adanya diskriminasi terhadap kaum Tionghoa dengan dikukuhkannya undang-undang anti-China,¹¹ dibubarkannya Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang merupakan organisasi massa PKI pada masa Orde Lama.

Setelah Sidang Umum MPRS tahun 1967 Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden RI, Indonesia pada periode ini memasuki babak baru apa yang disebut sebagai Rezim Orde Baru. Pada periode ini Sekber Golkar memiliki peluang untuk memainkan peranan penting politik, terutama yang berhubungan dengan Pemilihan Umum yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1968, tetapi pemerintah merencanakan untuk menunda hingga tahun 1973. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar yang semula dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan atas inisiatif militer pada tanggal 20 Oktober 1964. Pembentukan Sekber Golkar selain dari pihak militer yang diketuai oleh kolonel Djuhartono dan empat wakilnya dari kelompok cendekiawan sipil, yaitu diantaranya Imam Pratigny (NU), J.K Tumakaka (PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam) sedangkan Dr. Amino Gondoutomo bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris.¹²

¹⁰Dimana Strategi ini di sebut ISI (Import Substitution Industrialization) dijadikan sebagai simbol pembangunan ekonomi, terutama guna merehailitasi hubungan dengan negara-negara kreditor asing, maka dari itu pemerintah bergabung dengan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Kuskrido. *Op.cit.*, hlm.30.

¹¹Hari Satria. *Op.cit.*, hlm.33.

¹²Leo Suryadinata, *Op.cit.*, hlm. 26.

Pada waktu itu Sekber Golkar sebenarnya bukan untuk membentuk partai politik, tetapi untuk mengawasi dan mengimbangi kekuatan PKI yang terus tumbuh selama masa Orde Lama. Guna mengimbangi kekuatan PKI itu maka TNI juga membentuk organisasi tandingan bagi organisasi – organisasi onderbouw PKI. Tujuan dari pembentukan organisasi tandingan militer ini sebagai upaya meredam tindakan PKI yang mengorganisir massa besarnya untuk mendirikan negara komunis. Nama organisasi Sekber Golkar yang sebagai tandingan organisasi dari PKI adalah, Soksi (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia), Gakari (Gerakan Karyawan Republik Indonesia), BPPK (Badan Pembina Potensi Karyawan), Kosgoro (Koperasi Simpan Gotong Royong), dan MKGR (Musyawarah Keluarga Gotong Royong).¹³

Selanjutnya elite militer melakukan restrukturisasi didalam tubuh Sekber Golkar pada Mukernas III di Cibogo, Jawa Barat, pada tanggal 7 juli 1969,¹⁴ yaitu dengan agenda menambahkan kelompok induk organisasi (Kino) sebagai langkah memperkuat fungsi melalui pembagian divisi dan di harapkan untuk mendapat simpatik rakyat guna memenangkan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 1971. Pengaktifan kembali dan penambahan kelompok fungsional itu berupa kelompok Profesi (Organisasi massa non – ABRI,¹⁵), Ormas Hankam (Organisasi

¹³ *Ibid.*, hlm.15.

¹⁴ Mukernas III Bogor merupakan lanjutan dari mukernas I Sekber Golkar untuk membentuk cabang kedaerah – daerah pasca terbentuknya Sekber Golkar. Mukernas II Sekber Golkar rencana akan dilangsungkan pada tanggal 6-10 Oktober 1965 di Cipayung, Bogor, namun disebabkan peristiwa Gestapu Mukernas tersebut ditunda, dilaksanakan kembali pada tanggal 9-10 Desember 1965 yang menghasilkan MayJend S. Sukowati sebagai Ketua Umum Sekber Golkar menggantikan Brigjend Djuhartono periode 1966-1971. Pergantian Ketua Umum Baru Sekber Golkar merupakan langkah persiapan untuk menghadapi Pemilu 1971, maka Mayjend S. Sukowati beserta para jajaran pengurusnya yang terdiri dari elit militer perlu adanya Musyawarah kembali. Leo Suryadinata. *Op.cit.*, hlm. 112.

¹⁵ Organisasi massa Profesi yang dirangkul oleh ABRI adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga membentuk Korpri di dalam berbagai kementerian, lembaga – lembaga dan perusahaan-perusahaan karena adanya bermacam intimidasi untuk bergabung. Kesaksian Ali Murtopo dalam bukunya *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: Centre for strategic and International studies (CSIS),. 1974), hlm. 80.

Semi ABRI, semi organisasi massa dimana berafiliasi dengan organisasi politik lainnya),¹⁶ Gakari, Soksi, MKGR, Kosgoro, dan golongan Tenokrat.

Terbentuknya ketujuh kino ini dalam pengelompokannya, maka kekuatan organisasi dan massa Golkar bertambah signifikan dan percaya diri menghadapi Pemilu 1971. Hal ini ditunjukkan ketika Golkar dalam menghadapi Pemilu 1971 mampu memperoleh suara terbesardengan perolehan suara 34.348.673 juta suara atau sekitar 62,60 %, sehingga Sekber Golkar memperoleh 236 kursi di Parlemen (DPR), dan mengalahkan partai politik pesaingnya yaitu Partai Nahdhatul Ulama (NU) mendapatkan suara 10. 213.650 juta suara atau 18,67 % , sedangkan Partai Nasional Indonesia (PNI) hanya mendapatkan 3.765. 266 suara atau 6,76 % dari total suara, padahal PNI telah berani mengklaim jauh sebelum dimulainya Pemilu 1971 akan keluar sebagai pemenang Pemilu.¹⁷ Setelah memenangi Pemilu 1971 telah tampak akan menjadi organisasi pendukung pemerintah Soeharto, dengan diubahnya Sekber Golkar menjadi Golkar pada tanggal 17 Juli 1971 dan sejak itu juga hasil kemenangan Sekber Golkar di dalam Pemilu 1971 telah memberi dampak bagi organisasi Golkar untuk memberikan legitimasi dalam melakukan upaya perubahan dan pembaruan struktur politik melalui mekanisme penyederhanaan partai beserta kekuatan sosialnya.¹⁸

Guna mengokohkan kedudukan Rezim Orde Baru Soeharto, membuat gagasan penyederhanaan partai atau dikenal dengan istilah fusi partai politik dengan tujuan tidak lain dari pelaksanaan fusi partai politik ini adalah untuk mengukuhkan kekuatan Orde Baru dan menekan partai-partai lain selain Golkar untuk berkembang sebagaimana terjadi pada masa Orde Lama. Dengan dukungan

¹⁶Organisasi ini meliputi Badan Kerjasama dengan ABRI yaitu, Badan Kerjasama Buruh Militer, Badan Kerjasama Tani Militer, Badan Kerjasama Ulama Militer, Badan Kerjasama Pemuda militer, dan Badan Kerjasama Wanita militer. Leo Suryadinata. *Op.cit.*, hlm. 66.

¹⁷Ali Murtopo. *Op.cit.*, hlm. 120.

¹⁸Suhardirman, Proses Pembaharuan Golkar dalam Rangka Pembaharuan Struktur Politik. di dalam jurnal *ilmu politik*, (Jakarta; Gramedia, 1979), hlm.9.

kekuatan ABRI dan Golkar di parlemen, dalam menjalankan instruksi dari Presiden Soeharto apa yang disebut sebagai masa penyederhanaan partai, di bawah komando Ali Murtopo diadakan lobi tingkat tinggi membicarakan perombakan struktur politik.¹⁹

Maka tanggal 5 Januari 1973 partai- partai di Indonesia di paksa untuk menjadi dua bagian utama yaitu spiritual (keagamaan), dan golongan nasionalis. kelompok partai keagamaan yang terdiri dari Nahdhatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menyatakan bergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terbentuk pada 5 february 1973. Kelompok yang menekankan pada aspek non-keagamaan atau nasionalis terdiri dari Partai Nasional (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terbentuk pada 10 Januari 1971. Hasil pengelompokan ini dibakukan dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang partai politik Indonesia hanya dua partai politik yaitu: PPP, PDI dan Golkar. Penggabungan atau fusi tersebut bertujuan untuk mengurangi partai –partai politik di luar Golkar atau memperlemah persaingan kompetisi partai, hal tersebut dimungkinkan akan terjadi pertarungan politik yang dilatarbelakangi oleh masing-masing partai politik yang tergabung dalam fusi partai.

Mengenai sistem keorganisasian, Golkar telah mengembangkan satu struktur yang begitu luas dan berakar dimasyarakat, dengan pendirian cabang dan ranting di daerah – daerah dimana Golkar membentukKorpri (Korp Pegawai Negeri Sipil) yang di perangkat Pemerintah desa seperti, Dharma Wanita, Koperasi Unit Desa (KUD), penyelenggaraan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berdasarkan inisiatif dari organisasi massa Golkar yang dibawah Musyawarah Keluarga gotong Royong yang bernama (MKGR). Pada tingkat bawah, struktur organisasi dibuat sejajar dengan militer dan birokrasi pemerintah. Atas bantuan para perwira militer teritorial dan birokrat

¹⁹Ali Murtopo pada saat itu Ketua Bappilu (Badan Pengendalian dan Penangan Pemilu) Tahun 1971.

ditingkat terendah, Golkar membangun struktur organisasi yang hierarkis dari tingkat nasional hingga tingkat desa, Seperti ditingkat kecamatan diadakan Koramil (Komando Rayon Militer) yang membawahi Bintara Pembina Desa (Babinsa). Mulai saat itu juga pemerintah terus memperlemah partai – partai politik dengan melarang mereka merawat atau mengembangkan jaringan organisasi di bawah kabupaten. Sementara Golkar bebas mendirikan jaringan kader di tingkat desa, dua partai yang lain PPP dan PDI tidak di izinkan menjalankan strategi yang serupa.

Selanjutnya mengenai kelompok kepentingan, Golkar membolehkan militer dan birokrasi memiliki saluran politik sendiri memiliki tiga saluran politik yang umum dikenal sebagai jalur ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Hal terpenting lainnya terjadi pada tahun 1973 terjadi perkembangan lain, yakni Golkar mulai menjangkau berbagai kelompok sosial seperti buruh industri, petani, dan nelayan yang diorganisir dibawah Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), Himpunan Karya Tani Indonesia(HKTI), dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Dari pembentukan organisasi sosial ini adalah untuk memperkuat citra Golkar agar terkesan populis dan berbasis kemasyarakatan. Organisasi lain yang dibentuk dalam bidang kepemudaan yaitu KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), yang khusus dirancang untuk merangkul kaum pemuda dan aktivis mahasiswa. Guna merangkul elemen keorganisasian dibidang keagamaan Golkar mendirikan GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam), suatu organisasi pendukung yang ditujukan untuk mendekati kalangan muslim tradisional agar mendukung Golkar.

Langkah – langkah Golkar tersebut tidak berhenti di situ saja dan awal 1980-an, telah menjangkau kelas pengusaha dan memasukkannya ke dalam struktur organisasinya. Pada masa ini, Sudharmono, Ketua Golkar yang juga Menteri Sekretaris Negara, memelihara kelompok – kelompok bisnis yang terdiri atas para pengusaha muda dan pribumi.²⁰Hal ini dimungkinkan karena Sudharmono sebagai Menteri memiliki kewenangan untuk mengatur semua proyek negara dan mendistribusikannya kepada para pengusaha yang baru muncul. Sebagai imbalan,

²⁰*Ibid.*, hlm.60.

para pengusaha itu memberikan dukungan kepada Golkar entah dengan cara bergabung atau dengan memberikan bantuan kepada Golkar. Hubungan antara Golkar dan para pengusaha ini dipelihara lebih jauh melalui Kadin (Kamar Dagang dan Industri), dan bukan kebetulan jika beberapa pemain kunci di Kadin menjadi sumber dana Golkar masa itu.

Berbagai strategi Golkar di masa Rezim Orde Baru selalu muncul untuk memenangkan Pemilu yang digelar sebanyak enam kali selama Orde Baru, karena Golkar dengan menjelajahi segala bentuk penyaluran dan kepentingan kolektif yang ada di masyarakat terutama di pemerintahan desa.²¹ Golkar juga mendapat keuntungan dengan merangkul pegawai pemerintahan tingkat desa untuk masuk dalam tubuh Organisasi Golkar disebabkan adanya aturan bahwa pegawai Pemerintah dilarang untuk terlibat dalam aktivitas partai politik²² dimana Golkar yang menjadi perangkat di pemerintahan desa karena menjadi anggota Korpri dan anggota Golkar dan mereka punya peranan penting dalam kegiatan politik sehari-hari terutama dalam upaya pemenangan Golkar setiap Pemilu digelar. Kondisi diatas menunjukkan bahwa tidaklah mengherankan sejak Pemilu tahun 1971-1997 Golkar selalu menjadi pemenang Pemilu.

Sistem politik yang dibangun Rezim Orde Baru yang tergambar diatas membuatnya mampu bertahan selama 32 tahun. Banyak pengamat politik yang

²¹ Hal ini karena Golkar adalah milik pemerintah yang dikategorikan sebagai nonpartai yang memiliki jaringan sampai ke perangkat desa seperti misalnya aparat birokrasi mulai dari lurah, camat, bupati, pamong desa, dan lain sebagainya di jadikan mesin politik yang dikendalikan oleh Golkar untuk penggalangan massa terutama pada saat menjelang Pemilu, sehingga dibuatlah gerakan pemenangan untuk memilih Golkar yang disebut karakterkdes, yaitu mekanisme untuk ,menjadi kader Golkar pada teritorial desa.

²² Disebutkan dalam UU No.20 tahun 1976 tentang pelarangan terlibatnya Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya, yaitu berisikan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Pegawai / karyawan Bank milik negara, perusahaan milik negara, badan usaha negara lainnya, kepala pemerintahan yang mencakup kepala daerah dan pejabat negara melarang aktivitas menjadi anggota partai politik atau Golongan Karya. Akan tetapi Golkar pada masa Orde Baru tidak ingin disebut sebagai partai politik yaitu organisasi sosial yang berorientasi ke karyawan. Oleh karena itu sebutan organisasi sosial politik Golkar ini pada masa Orde Baru menguntungkan Golkar di setiap pemenangan Pemilu.

menyatakan bahwa Rezim Orde Baru takkan pernah bisa runtuh bahkan tidak pernah memprediksikan jika rezim Orde Baru mengalami keruntuhan. Pada saat terjadi ingar – bingar politik dan isu suksesi, perekonomian Indonesia dihadapkan pada munculnya krisis moneter yang juga melanda beberapa negara Asia. Sebelumnya tidak ada yang bisa memprediksi bahwa perekonomian Indonesia bakal terjerembat krisis moneter yang demikian dalam apalagi sampai berdampak di bidang politik.²³ Munculnya krisis moneter ini semakin mendorong para aktivis terutama kaum intelektual dan aktivis politik untuk melakukan suatu gerakan yang menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Hal ini menandakan bahwa krisis moneter ini akhirnya mengarah pada krisis kepercayaan terhadap pemerintah sehingga memicu demonstrasi besar-besaran. Jumlah aksi – aksi anti Soeharto dan Golkar pun semakin bertambah baik di kampus – kampus maupun di jalanan dengan membawa isu turunkan Presiden Soeharto dan pembubaran Golkar oleh gerakan reformasi.

Faktor yang dominan terjadinya perubahan negara Indonesia ke arah reformasi karena watak rezim Orde baru yang otoriter dan diikuti oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan keluarga cendana maupun pejabat negara. Hal ini membuat gerakan – gerakan rakyat yang dipelopori oleh aktivis mahasiswa, ormas, dan elemen masyarakat lainnya yang mengatasnamakan kaum reformis tidak dapat menerima model pemerintahan Soeharto yang sentralistik, diktatoristik, dan militeristik yang dibangun dengan kekuatan partai tunggalnya Golkar yang ditopang oleh TNI dan Birokrasi.

Gerakan reformis yang puncaknya berlangsung pada 21 Mei 1998 telah mengakibatkan terjadinya peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden Burhanudin Jusuf Habibie. Sebagai penerus kekuasaan Soeharto, Presiden B.J Habibie mendapat tekanan yang kuat dari kaum Reformis untuk menuntut melakukan sejumlah pembaharuan di bidang politik, seperti pembaharuan undang – undang tentang partai politik, undang – undang tentang

²³Affan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004.), hlm. 333.

Pemilu, undang – undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Selain itu pemerintahan B.J Habibie juga di desak agar segera menyelenggarakan Pemilu, karena sebagian kalangan pro demokrasi meragukan legitimasi Presiden B.J Habibie sebagai pengganti kedudukan Soeharto.

Presiden B.J Habibie merespon tuntutan dicabutnya paket undang – undang politik, kemudian Habibie menyerahkan penyusunan konsep RUU politik pemerintah kepada beberapa intelektual yang dikenal sebagai “ Tim Tujuh” yang diketuai oleh Ryas Rasyid, dengan anggota komite antara lain adalah Ramlan Subakti, Andi Malarangeng, Afan Gafar, Djoehermansyah Djohan, Luthfi Mutty, Anas Urbaningrum. Beberapa persoalan yang dibahas dalam rancangan tim tujuh beberapa ditujukan untuk mengeluarkan TNI dari DPR dan pelarangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam kegiatan partai. Hal yang tidak mengejutkan, Golkar sangat menentang aturan ini karena menjadi pukulan baginya bahwa sejalan dengan perubahan politik yang tidak lagi mengarah pada eksistensi partai tersebut.

Pada masa ini Golkar harus mengalami cercaan dan makian yang tak kunjung berhenti, sehingga berkembang stigma yang luas bahwa Golkar sama buruknya dengan Soeharto dan Orde Baru. Berbagai stigma melalui media massa audio visual yang luas dan intens, ditambah kecaman dan makian yang terus bergema dalam acara – acara *Talkshow* politik, baik di media massa cetak, televisi, maupun radio, upaya sistematis menghancurkan citra Golkar seakan menemukan titik perjuangan yang sempurna. Golkar bagaikan musuh bersama yang layak dijauhi oleh siapa saja. Kematian Orde Baru seakan ikut dilengkapi dengan hancurnya Golkar, sehingga pada situasi seperti ini siapapun yang nantinya memimpin Golkar akan menghadapi situasi yang sangat dilematis

Situasi yang dihadapi Golkar pada saat itu sudah sangat genting dan membahayakan organisasi, Ny. Mien Sugandhi selaku Ketua Pusat Kosgoro mendesak kepada para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar untuk segera melakukan Musyawarah Luar Biasa, maka segera diadakan Munaslub pada

tanggal 9-11 Juli 1998 dengan agenda memilih calon ketua umum baru dan menuntut Harmoko selaku ketua umum mengundurkan diri. Munaslub menjadi proses pertama bagi pemilihan ketua umum baru pasca Orde Baru dan Akbar Tandjung terpilih sebagai ketua umum dengan cara pemilihan demokratis pertama dengan mengalahkan pesaingnya Edy Soedrajat dari kubu militer.

Terpilihnya Akbar Tandjung merupakan satu terobosan bagi usaha aktivis Golkar yang merangkak dari bawah. Karir Akbar Tandjung diawali sejak membidani Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 1973, dan Angkatan Muda Pembaharu Indonesia (AMPI), dan selanjutnya menjadi Ketua Umum Golkar. Kematangan karir berpolitik Akbar Tandjung membuat orang – orang di dalam Golkar yang menyebut dirinya sebagai pro-reformis yang terdiri dari kubu pendukung kemenangan Akbar Tandjung dan didukung oleh Habibie. Habibie yakin sosok Akbar Tandjung dianggap sebagai kemenangan jalur G (Golkar), karena Ia lahir dan besar di lingkungan Golkar.²⁴

Lepasnya dua pilar utama pendukung Golkar yaitu Pegawai Pemerintah (Birokrasi) dan TNI memaksa Golkar harus bertahan dengan apa yang tersisa yaitu kelompok aktivis dan kelompok korporat atau pengusaha.²⁵ Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung merupakan orang yang dianggap bisa masuk di dalam ranah keduanya yaitu kelompok aktivis dan pengusaha. Ia pernah menjadi Ketua Pengurus Besar HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Akbar Tandjung bersama sejumlah tokoh mantan (eks) HMI pendukung Akbar Tandjung seperti Fahmi Idris, Marzuki Darusman dan beberapa tokoh dari berbagai kalangan lainnya yang

²⁴ Akbar Tandjung memulai karir masuk ke Golkar pada tahun 1977 karena direkrut oleh Ali Murtopo yang saat itu menjadi Deputy (1968-1975) dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (1975-1983), Menteri Penerangan Negara (1975-1983). Ali Murtopo menyarankan kepada Akbar Tandjung untuk menjadi kader Golkar dan ikut dalam FKP DPR RI di wilayah Jawa Timur. Anwari WMK., *Bukan Sekedar Kata : Perjalanan Politik Akbar Tandjung*, (Jakarta; Penerbit Khanata, 2005), hlm.30.

²⁵ Para Aktivis tersebut terdiri atas berbagai alumni pemimpin organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia). Disisi lain, kelompok pengusaha yang terdiri atas beragam Organisasi bisnis seperti HIPMI dan REI (Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia) .

masih bertahan di Golkar pasca Rezim orde Baru berusaha agar partainya tidak terhempas dari persaingan politik pada masa transisi politik dengan menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan publik yang terus menyuarakan pembubaran terhadap Golkar.

Oleh karena itu yang menjadi tantangan bagi Akbar Tandjung untuk menjaga eksistensi partai Golkar, terutama apa yang harus dilakukan untuk memenangi pemilu?. Strategi apa yang dijalankan untuk memelihara citra ideologis partai Golkar. Secara umum Akbar Tandjung menawarkan satu tema yang mendasar sebagai perubahan mengubah Golkar menjadi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu 1999. Sebagai partai politik yang lekat dengan stigma Orde Baru, ideologi partai Golkar reformasi tidak berdasarkan kebijakan partai yang beraliran ke-kiri atau ke-kanan, melainkan berprinsip pada kebijakan partai yang bersifat demokratis, moderat dan terbuka yang dikenal sebagai paradigma baru Golkar. Hal ini didasarkan keinginan dan situsasi yang mengharuskan partai Golkar untuk mengikuti arus dan tuntutan reformasi.²⁶

Selanjutnya, Akbar Tandjung melakukan audit internal partainya, dimana audit ini meliputi evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan internal partai, serta menjajaki ancaman dan peluang di lingkungan eksternal maupun internal partai. Audit ini meliputi konsolidasi kembali dengan organisasi sayap pendukung Golkar selama Orde Baru, konsolidasi kader secara nasional dari tingkat atas sampai bawah atau secara *button up*, penyampaian sosialisasi ideologi partai Golkar baru ke masyarakat, perekrutan kader – kader baru Golkar untuk menghadapi Pemilu, melakukan kunjungan – kunjungan ke tokoh-tokoh agama (yang memiliki pesantren), kepala adat di daerah-daerah yang masih mempunyai basis massa Golkar yang kuat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas membuat penulis tertarik mengkaji tentang “Peran Akbar Tandjung dalam menyelamatkan Golkar pada masa krisis politik”. kajian ini dimaksudkan sebagai kajian sejarah politik.

²⁶ Akbar Tandjung, *The Golkar way : Survivel Partai Golkar di tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 22

berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil tema dengan pertimbangan.

1. Partai Golkar yang mulanya kental dengan Orde Baru, Pasca kejatuhan Soeharto mengalami hujatan, intimidasi, dan sejenisnya.
2. kenyataan yang mengejutkan keberhasilan Partai Golkar menduduki ranking kedua pada Pemilu 1999 ditengah hujan cacian, makian, dan hampir dibubarkan.
3. Sepak terjang Partai Golkar ini yang berusaha untuk *survive* ditengah perubahan politik atau transisi politik pasca reformasi.
4. Suatu kajian yang menarik karena Partai Golkar dalam sejarah partai di Indonesia berkaitan erat dengan militer dan penguasa, pasca runtuhnya Soeharto partai Golkar mengalami dinamika politik sehingga melepaskan dua pilar penyokongnya yang disebut AB (ABRI, Birokrasi). Dan mampu memadukan antara realitas politik dan ide yang hendak diperjuangkan.

Pengertian judul untuk memahami judul agar lebih jelas maka penulis mencoba menjabarkan secara lebih detail berdasarkan urutan kata-katanya. Peran adalah suatu perangkat tingkah yang di harapkan di miliki oleh orang suatu aktor utama yang berkedudukan di suatu masyarakat atau kalangan kelompok,²⁷ Akbar Tandjung sendiri adalah Ketua Umum Partai Golkar Periode 1998-2004, dimana dalam judul tersebut membahas peran Akbar Tandjung ketika Partai Golkar pasca reformasi yang dipimpinnya sebagai Ketua Umum Partai, karena Ia yang menjalankan peran yang dominan dalam peristiwa tersebut, dan ditengah upaya arus pengaruh utamaan aktivitas politik Akbar Tandjung sebagai sosok politikus yang dicermati di kalangan organisasinya di kolega Partai Golkar.

Menyelamatkan partai Golkar pada masa krisis politik tahun 1998 – 1999. menyelamatkanyaitu menghindarkan, meluputkan atau membebaskan

²⁷Daryanto S.S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.*, (Surabaya : Apollo, 1998), hlm.454.

membebaskan dari bahaya supaya selamat atau dari hal – hal yang tidak di inginkan.²⁸ Partai Golkar adalah partai politik yang didirikan oleh elite militer pada masa Orde Lama tepatnya di masa Demokrasi dipimpin pada tanggal 20 Oktober 1964 yang masih bernama Sekretariat Bersama Golongan karya (Sekber Golkar), setelah menang di Pemilu tahun 1971 Sekber Golkar merubah namanya menjadi Golkardimana selanjutnya organisasi Golkar ini menjadi fondasi penting pada masa Orde Baru sebagai mesin politik Orde Baru karena untuk mendukung rezim dan mengamankan posisi Rezim Orde Baru, ketika rezim Orde Baru runtuh partai tersebut mengalami intimidasi, hujatan atau sejenisnya.²⁹ Krisis Politik menurut O'Donel dan Schmitter adalah keadaan dimana suatu daerah atau negara yang terdapat permasalahan politik karena ada permasalahan yang dianggap oleh masyarakat atau rakyat bahwa kedaulatan rakyat berada pada kepentingan di tangan sekelompok tertentu atau bahkan dipegang oleh para penguasa, yang mengakibatkan keadaan ini munculnya rasa tidak percaya terhadap institusi pemerintah atau dewan perwakilan, ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan suatu gerakan reformasi untuk menuntut mengganti kepala daerah atau Presiden dan menggelar Pemilihan Umum secepatnya.³⁰ Tahun 1998-1999 adalah dimana dalam kurun waktu satu tahun setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia karena tuntutan dari gerakan reformasi dan segera digantikan oleh Burhanudin Jusuf Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden, B.J Habibie melakukan pembaharuan politik yaitu bebas mendirikan partai (sistem multipartai), kebebasan pers, Penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR, pembahasan mengenai peran TNI/Polri dalam politik di legislatif, pelaksanaan Pemilu 7 Juni 1999, pembebasan narapidana politik, pemisahan kepolisian dan TNI, dari pembaharuan tersebut di sebutkan bahwa tahun 1998-

²⁸ *Ibid.*, hlm. 513.

²⁹ David Reeve, *Golkar Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika.*, (Depok; Komunitas Bambu, 2013), hlm.14.

³⁰ Dr. Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta; Prenada Media Grup, 2014), hlm.66.

1999 adalah pemerintahan reformasi.³¹ Maka pengertian judul keseluruhan adalah Peran Akbar Tandjung Menyelamatkan Partai Golkar Pada Masa Krisis politik Tahun 1998-1999.

1.2 Rumusan Masalah

Suatu karya ilmiah membutuhkan arahan yang sesuai dengan kajian yang dipaparkan, oleh karena itu memerlukan suatu pembatas yang mampu membantu membentuk tulisan yang teratur dan sistematis. Maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang sesuai dengan pembahasan ini. Berikut rumusan masalah yang akan dikaji sesuai dengan latar belakang di atas:

1. Bagaimana Kondisi Golkar pada masa Krisis Politik pada tahun 1998-1999?
2. Sejauh mana peran Akbar Tandjung dalam menyelamatkan Golkar pada masa krisis politik tahun 1998?
3. Bagaimanakah Partai Golkar dalam menghadapi pemilu 1999 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan suatu karya ilmiah pastilah memiliki tujuan dan manfaat bagi orang lain, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis politik partai Golkar pada masa krisis politik
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis langkah politik Akbar Tandjung dalam menyelamatkan partai Golkar
3. Mendeskripsikan kondisi Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 1999

³¹Dr. M.Ed., Nana Supriatna, *Perkembangan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Widjaja, 2009), hlm.92.

1.3.2 Manfaat

1. Karya ilmiah ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah
2. Memberikan kontribusi bagi pendukung dan simpatisan Golkar untuk mengambil kebijakan partai terhadap proses wacana Pemilu selanjutnya
3. Penulisan ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang strategi Golkar dalam kemenangan Pemilu 1999

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan karya ilmiah peneliti harus menunjukkan secara jelas lingkup penelitiannya, baik lingkup spasial (ruanggeografis), lingkup temporal (waktu). Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah menjadikan penelitian lebih mudah untuk dilakukan secara empiris, metodologis dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ruang lingkup spasial adalah batasan yang didasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau satuan wilayah administratif tertentu, misalnya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis memilih lingkup spasial berskala nasional dengan alasan bahwa Partai Golkar dalam kajian penulis mengamati Partai Golkar secara nasional karena berkaitan dengan peran strategis Partai Golkar di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang menaungi garis instruktif Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Golkar di daerah-daerah di seluruh Indonesia, maka dari itu scope spasial yang dipakai dalam tulisan ini yaitu scope spasial ber-skala nasional.

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dipilih dalam penelitian sejarah. Dalam penelitian dengan judul “ Peran Akbar Tandjung Dalam Menyelamatkan Golkar Pada Masa Transisi Politik Tahun 1998 -1999”. Lingkup temporal tahun 1998 dipilih dengan alasan pada masa itulah Golkar mengalami dinamika politik pasca mundurnya Soeharto sebagai Presiden selama Orde Baru dan sekaligus sebagai dewan pembina partai Golkar. Imbas dari lengsernya Soeharto Golkar menjadi sasaran hujatan dan kecaman dari masyarakat terutama

kaum reformis untuk dibubarkan karena dianggap sebagai partai penyokong Orde Baru yang otoriter. Tahun 1999 dipilih sebagai batasan akhir dengan alasan pada tahun ini Golkar menjadi pemenang Pemilu kedua setelah PDI, dan justru mampu membalikkan ramalan berbagai kalangan pengamat politik maupun lawan politiknya.

Tulisan ini merupakan kajian sejarah politik, dimana skripsi ini membahas Politik Golkar pada masa transisi politik tahun 1998-1999 dimana partai politik ini mengalami hujatan, cercaan, dan intimidasi lainnya setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dan saat menghadapi kontestasi politik pada tahun 1999. Sejarah politik adalah analisis peristiwa – peristiwa politik, ide, gerakan dan para pemimpin yang biasanya disusun berdasarkan negara bangsa dan walaupun berbeda dengan ilmu sejarah akan tetapi berhubungan antara lain dengan bidang sejarah lain, seperti sejarah sosial, sejarah ekonomi, dan sejarah militer.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah mengulas atau meninjau bahan – bahan pustaka yang memiliki relevansi terhadap pokok materi penelitian, dan sebagai inspirasi, karya ilmiah yang menunjang suatu penulisan yang akan di tulis. Di tunjukkan perbedaan antara karya yang ditinjau dengan penelitian yang dilakukan.

Sampai proposal ini ditulis sebenarnya sudah ada beberapa kajian tentang Akbar Tandjung dan Golkar, yaitu disertasi Akbar Tandjung yang dibukukan dengan judul *The Golkar way : Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Membahas tentang liku-liku Golkar yang mampu keluar dari krisis 1998 setelah jatuhnya Orde Baru. Di masa reformasi, Golkar menjadi satu-satunya partai politik yang banyak dihujat masyarakat. Dimana-mana bendera Golkar dibakar, bahkan publik mendesak partai binaan mantan Presiden Soeharto ini dibubarkan.³² Usaha politik baru Akbar Tandjung beserta kolega – kolega

³² Akbar Tandjung menjelaskan dengan detail bagaimana kondisi perubahan politik pergantian kekuasaan dan dampaknya pada Golkar, ketika RUU politik di sahkan yang dihilangkannya pilar – pilar pendukung Golkar (Jalur ABRI, PNS). Akbar

Golkar merubah suatu pandangan itu sesuai dengan arus perubahan politik yang mendukung demokratisasi, sehingga menjadikan pandangan ideologi Golkar lama menjadi ideologi Golkar yang baru yang disebut paradigma baru Golkar.³³

Meskipun karya Akbar Tandjung ini mengungkap hal – hal yang baru mengenai sejarah perjalanan politik yang di bawa Akbar Tandjung dari tantangan *survivenya* Golkar sampai memenangi pemilu 1999 dan juga pemilu 2004. Karya tersebut tidak menyinggung mengenai bagaimana langkah politik Akbar Tandjung di tahun 1998 – 1999 untuk menguatkan Golkar ke suksesi tahun 1999.

Kajian yang kedua, yaitu Thesis Rully Chairul Azwar dengan judul *Politik Komunkasi Partai Golkar di Tiga Era : Dari Partai Hegemonik ke Partai Berorientasi Pasar*,. Buku ini merupakan hasil pelacakan terhadap model politik komunikasi Partai Golkar di tiga era kepemimpinan yang berbeda, yaitu era Harmoko (1993-1998), era Akbar Tandjung (1998-2004) dan era Jusuf Kalla (2004-2009). Golkar di era Harmoko dikategorikan sebagai partai hegemonik, karena tidak otonom dari kekuasaan, tetapi justru menyatu dengan kekuasaan.Selain itu, struktur politiknya tidak kompetitif yang ditandai dengan tidak adanya rotasi kepemimpinan dan belum berpandangan diperlukannya pasar.³⁴Sementara di era Akbar Tandjung posisi Golkar berada di luar kekuasaan sehingga lebih bebas memainkan peran politiknya. Politik komunikasi Partai Golkar era Akbar Tandjung juga tidak menentang pasar, kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran model politik komunikasi Golkar bergerak

Tandjung, *The Golkar way : Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*(Jakarta,Gramedia Pustaka Utama ,2008), hlm. 58

³³Sistem itu dikenal dengan perumusan Golkar yang independen, pluralis, dan inklusif (terbuka), dan melaksanakan fungsi-fungsi politik secara konsisten. Transformasi Golkar menjadi Partai Golkar. Pernyataan ini deklarasi partai Golkar 7 Maret 1999. *Ibid.*, hlm.99.

³⁴Rully Chairul Azwar, *Politik Komunkasi Partai Golkar di Tiga Era : Dari Partai Hegemonik ke Partai Berorientasi Pasar*(Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2009) , hlm. 57.

menuju Market Oriented Party (MOP).³⁵ Di era kepemimpinan Jusuf Kalla, relasi Golkar dan kekuasaan mengalami perubahan. Hal ini merupakan konsekuensi politik dari posisi Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden (Wapres), maka otomatis Golkar berada dalam kekuasaan meskipun tidak dominan.³⁶ Model politik komunikasi Golkar berdasarkan Market Oriented Party (MOP) dimodifikasi dengan model MOP ala Golkar yang menerapkan seluruh tahapan MOP dengan diversifikasi pada tingkatannya, yaitu MOP tingkat nasional dan MOP tingkat lokal. Oleh sebab itu semua kekurangan akibat posisi dilematis Golkar dalam kekuasaan di tingkat nasional dapat direduksi di tingkat lokal.

Dari karya Rully Chairul Azwan ini yang terletak pada perbandingan gagasan (pemikiran) atau model politik yang diterapkan pada Ketua Umum Golkar dari tiga era yang ditulis oleh Rully Chairul Azwan, tetapi tidak dijelaskan mengenai bagaimana Golkar dengan cara survivalnya dan langkah politik Akbar Tanjung dalam konsolidasi eksternal dan internal untuk menyelamatkan Golkar dan pemetaan untuk menghadapi pemilu 1999.

Kajian yang ketiga penulis menemukan tulisan Skripsi Abbas dalam skripsinya yang berjudul "*Etika Politik Akbar Tanjung*" tahun 2008 Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Dalam skripsi ini Abbas menekankan pada perjalanan politik Akbar Tanjung dari masa fase kanak – kanak, remaja, dan dewasa, mengupas segala organisasi – organisasinya dan kiprahnya menuju perpolitikan di Indonesia dengan Etika Politik yang santun, punya integritas moral, berakhlak mulia, dan sekaligus sangat akseptabel, dan lincah dalam berpolitik.³⁷ Disini Abbas juga mengulas dimensi etis gagasan dan praktik politik Akbar Tanjung yang berhubungan dengan praktik institusi yang berkaitan dengan sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi.

Dari dimensi inilah etika politik yang berhubungan dengan Akbar Tanjung menanyakan masalah – masalah yang berkaitan dengan institusi – institusi di atas

³⁵*Ibid.*, hlm. 96.

³⁶*Ibid.*, hlm.,149.

³⁷Abbas, *Etika Politik Akbar Tanjung*, S1, (Yogyakarta: Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, Universitas Islam Negeri, 2008), hlm. 45.

yang oleh Abbas ditelaah untuk dijadikan sebagai etika politik yang diterapkan Akbar Tanjung dalam praktek politiknya di panggung politikan Indonesia. Dari Skripsi Abbas ini membantu penulis dalam penalarannya bagaimana Akbar Tandjung berkomunikasi politik dalam perannya sebagai Ketua Umum Golkar untuk menyelamatkan Partai Golkar dimasa krisis politik atau masa transisi politik Indonesia pada tahun 1998-1999.

Dari kajian ketiga karya diatas, maka dalam skripsi yang berjudul Peran Akbar Tandjung Dalam Menyelamatkan Partai Politik Golkar Pada Masa Krisis Politik Tahun 1998-1999. Penulis berusaha untuk mengkaji Peran Akbar Tandjung untuk menyelamatkan partai Golkar dalam kurun waktu paska runtuhnya Orde Baru partai Golkar mengalami berbagai hujatan dan intimidasi yang berdampak pada pencitraan partai Golkar oleh kaum reformis karena dianggap sebagai partai yang bertanggungjawab atas dosa-dosa Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru pun membawa dampak pada konflik internal partai Golkar untuk segera melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yaitu memilih Ketua Umum baru partai Golkar yang diharapkan untuk membawa pencitraan kembali partai Golkar sekaligus mampu menjawab tantangan perubahan sistem politik pasca runtuhnya Orde Baru dan era baru yang disebut era Reformasi. Dalam perjalanan Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum pada masa krisis politik tahun 1998-1999 yang pada masa itu memunculkan perubahan sistem politik yaitu sistem multipartai dan mempercepat adanya Pemilu tahun 1999. Pada periode tersebut partai Golkar oleh pesaing partai politik yang lain atau partai-partai yang baru bermunculan maupun dari pengamat politik mendapatkan hujatan untuk mengundurkan diri sebagai peserta Pemilu karena tidak akan berhasil mengubah keadaan apapun yang terjadi pada Golkar, akan tetapi hasil mengejutkan yang tidak terduga oleh lawan politik maupun pengamat politik bahwa hasil Pemilu 1999 partai Golkar menjadi pemenang kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam kontestasi Pemilu 1999 yang merupakan pemilu rakyat pertama setelah runtuhnya Orde Baru.

Maka dengan kajian diatas penulis merasa bahwa penting untuk melakukan penelitian tersebut karena menyangkut belum adanya kajian yang

sama dengan judul Peran Akbar Tndjung Dalam Menyelamatkan Partai Golkar Pada Masa krisis Politik Tahun 1998-1999.

1.6 Pendekatan dan kerangka Teori

Sejarah sebagai kisah atau narasi mengungkap fakta mengenai apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Untuk menganalisa subjek atau bidang kajian yang diteliti, penelitian sejarah memerlukan alat bantu berupa konsep atau teori ilmu lain, khususnya ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang relevan.

Hal itu dapat membantu peneliti dalam memahami subjek penelitian sehingga berbagai aspek yang membentuk peristiwa dapat dijelaskan. Dengan kata lain, pemahaman tentang konsep teori ilmu lain yang relevan dengan subjek penelitian sangat berguna untuk membantu peneliti dalam menyeleksi sumber-sumber sejarah, menjelaskan hubungan-hubungan kausal, kondisional, dan struktural diantara fakta-fakta yang ditemukan.

Pendekatannya penulis menggunakan pendekatan politik karena membahas tentang dinamika partai politik khususnya dinamika Golkar. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar – dasar ilmu politik, politik adalah sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan – tujuan yang telah ditentukan.³⁸

Selain itu pengertian politik menurut Maurice Duverger dalam bukunya Sosiologi Politik, politik adalah Manifestasi dari suatu sistem yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri dan juga masyarakat. Dari pengertian ini Maurice Dufenger mengatakan sarana untuk mencapai tujuan dari sistem politik itu adalah dengan partai politik, dan harus di eksistensikan yaitu berupa; 1) anggota / kader partai yang lebih besar dan loyal terhadap partai politik tertentu. 2) kelompok elite partai yang mempunyai wewenang dan dapat

³⁸Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm.16.

menentukan arah kebijakan partai. 3) *Profesional workers*, pengurus dalam organisasi partai.³⁹

Dikatakan bahwa selain pelaksanaan kegiatan politik itu disamping segi – segi yang baik, juga mencakup segi – segi negatif ini disebabkan karena politik mencerminkan tabiat manusia, baik nalurnya yang baik maupun nalurnya yang buruk. Dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.⁴⁰ Singkatnya politik adalah faham yang menyangkut tentang kekuasaan (politik praktis), mempelajari kehidupan masyarakat dengan berbagai situasi politik. Politik memang tidak mengenal kawan atau lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan politik individu atau kelompok.

Penulisan skripsi ini juga diperlukan beberapa teori atau konsep tertentu untuk memahami masalah dan mempertajam analisis. Penulis menggunakan konsep teori kepartaian yang meliputi pengertian partai politik, fungsi partai politik, klasifikasi partai politik, dan tujuan partai politik. Miriam Budiardjo dalam bukunya “Dasar – Dasar Ilmu Politik” menjelaskan beberapa hal pokok mengenai definisi partai, fungsi dan peran partai politik, dan klasifikasi partai politik.

A) Definisi Partai politik

Menurutnya, partai politik sebagai organisasi publik yang membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi.

Selain itu definisi partai politik menurut Carl J. Friedrich di dalam buku Partai Politik : Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi karya Robert Michael,

³⁹Mauruce Dufenger. *Sosiologi Politik*.(Jakarta. Gramedia Pustaka.2012), hlm.44.

⁴⁰*Ibid.*, hlm.17.

mendefinisikan partai politik sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat materi maupun non materi kepada anggotanya. Partai Politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyatnya, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, dan menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (legitimate), dan damai ⁴¹. Secara keseluruhan partai politik suatu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis.

B) Fungsi Partai politik

Partai politik seperti halnya sebuah organisasi yang beroperasi dalam tataran aspirasi publik sehingga perlu melihat kembali peran dan tugas yang diembannya. Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi antara lain ⁴².

1) Sebagai komunikasi politik

Partai politik menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik dan mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hubungannya komunikasi politik partai politik partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

2) Sebagai sarana sosialisasi politik

Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan

⁴¹Robert Michael. *Partai Politik : Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. (Jakarta: Rajawali Press,1984), hlm.12.

⁴²Miriam Budiarto, *Op.cit.*, hlm. 167.

tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses sosialisasi politik berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

3) Sebagai sarana rekrutmen partai politik

fungsi ini sebagai seleksi kepemimpinan dan kader – kader yang berkualitas. Rekrutmen politik ini menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon – calon kader.

4) Sebagai partisipasi politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari para warga dari pada aktivitas mandiri.

5) Sebagai sarana pengatur konflik

Sebagai pengatur konflik. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak – pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi

dan kepentingan dari pihak - pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.

Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara atau pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakatlah disini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakannya.

C) Klasifikasi Partai politik

Metode yang paling konservatif dalam mengklasifikan partai politik ialah menurut jumlah partai yang ada dalam satu negara. Dengan cara konvensional tersebut dikenal adanya tiga klasifikasi partai politik yaitu⁴³:

1) Sistem Partai Tunggal (One Party system)

Didalam suatu negara hanya ada satu partai yang dominan diantara beberapa variasi tertentu. Sistem ini menunjukkan adanya satu partai yang dominan diantara beberapa partai politik kecil lainnya.

2) Sistem Dua Partai (Two Party System)

Biasannya digunakan untuk menunjukkan adanya dua partai politik dalam suatu negara atau dengan beberapa variasi tertentu menunjuk adanya beberapa partai politik tetapi terdapat dua partai yang berperan dominan.

3) Sistem Banyak Partai (Multy Party System)

Sistem ini menunjukkan adanya banyak partai politik dalam satu negara, tanpa memperhatikan jumlah partai politik yang mempunyai kedudukan dominan dalam pemerintahan.

Dari pengklasifikasi partai politik diatas, di Indonesia pasca reformasi melakukan perubahan sistem politik yaitu dengan sistem banyak partai (multy party sistem). Sebanyak 48 partai politik bersaing merebutkan kursi DPR / MPR pada Pemilu 1999. Partai Golkar merupakan partai yang harus melakukan

⁴³*Ibid.*,

perubahan dan penyesuaian yang perlu dilakukan oleh Golkar untuk menyelamatkan organisasi sejak runtuhnya Orde Baru yang berimbas pada dinamika partai ini. Para pengurus atau para pimpinan terutama ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), serta kader – kader Golkar lainnya merasakan pentingnya melakukan perubahan yang fundamental dalam menyelamatkan partai Golkar untuk menentukan sikap dalam menghadapi pemilu 1999.

D) Tujuan Partai Politik

Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara atau pemerintah karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa, maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya disini masyarakatlah yang akan selalu dirugikan dengan kebijakan – kebijakan tersebut. Selain itu tujuan khusus dari partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional.

Partai politik berbeda dengan gerakan, suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat diantara anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok yang kuat. Organisasinya kurang ketat dibanding partai politik, memang berbeda dengan partai politik, gerakan sering tidak mengadakan nasib dalam Pemilihan Umum.

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan, atau istilah yang sering kita dengar dewasa ini, kelompok kepentingan. Partai politik bertujuan memperjuangkan suatu kepentingan dalam skala yang luas melalui mekanisme Pemilihan Umum. Sedangkan kelompok penekan atau kelompok kepentingan yang lain seperti profesi, kelompok adat, organisasi kemasyarakatan hanya mengejar kepentingan-kepentingan sesaat dalam ruang lingkup yang lebih kecil serta melewati mekanisme politik formal seperti Pemilu.

Dari penjelasan tujuan tersebut dapat dikemukakan bahwa didalam studi “Peran Akbar Tandjung dalam penyelamatan partai Golkar pada masa krisis politik” dapat dipahami partai Golkar pada kepemimpinan Akbar Tandjung yang menjadi ketua umum pertama pasca Orde Baru. Terpilihnya Akbar Tandjung menjadi ketua umum diharapkan menjadi awal bagi perubahan Golkar di era reformasi yang diikuti pula dengan beberapa perubahan penting didalam tubuh organisasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Akbar Tandjung ingin mempertahankan kembali Partai Golkar di era reformasi karena selama tiga puluh tahun Golkar berada dalam kekuasaan dan paling banyak dalam mengambil segala kebijakan rezim Orde Baru, oleh karena itu Ia menginginkan kembali Partai Golkar untuk mengulang kejayaan kembali dan turut andil dalam pengambilan keputusan di parlemen.

Dengan runtuhnya Orde Baru dan pergantian rancangan sistem negara dengan adanya sistem multi partai maka Partai Golkar melakukan pengambilan keputusan yaitu *pertama*, perubahan ideologi di dalam organisasi yang tidak lagi menjadi mesin politik Soeharto dan kebijakan partai ditentukan oleh AD / ART partai melali rapat pimpinan partai Golkar. *Kedua*, syarat dan mekanisme dalam menentukan pemilihan umum Golkar tidak lagi ditentukan oleh Dewan Pembina Golkar yaitu Soeharto, tetapi melakukan proses pemilihan melalui para kader di dalam Munas. *ketiga*, perubahan didalam ormas-ormas pendukung partai Golkar dan dilakukan penambahan ormas-ormas baru sebagai pendukung partai Golkar.

1.7 Metode Penelitian

Sesuai dengan judulnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Ada empat tahapan dalam rekonstruksi peristiwa sejarah sebagai berikut:

(1) Heuristik atau sering disebut pengumpulan data(sumber sejarah). Hal ini dilakukan dengan cara observasi lapangan dengan interview kepada

narasumber, dan juga pengumpulan data melalui buku-buku atau majalah atau dokumen seaman. Berkaitan dengan pengumpulan sumber, Kuntowijoyo mengatakan bahwa menurut bahannya, sumber dibedakan menjadi dua, yaitu sumber tertulis (dokumen) dan sumber lisan.⁴⁴ Sumber tertulis yang digunakan di sini antara lain yang telah dipublikasikan melalui berbagai media, yaitu Koran Tempo, Kompas, Suara Karya, dan Republika, dokumen-dokumen yaitu AD/ART Partai Golkar Tahun 1998-1999, dan Rapim I Golkar pada Tahun 2002, catatan lapangan, buku – buku ilmiah, majalah ilmiah populer yaitu Prisma, Gatra atau lembaga – lembaga penelitian dan pendidikan yang diperkaitkan dengan permasalahan penelitian tersebut. Sedangkan sumber lisan yang digunakan di sini digali melalui wawancara sejarah lisan, dengan maksud menggali memori para saksi dan pelaku sejarah terkait peran Akbar Tadjung dalam dinamika politik Golkar pada masa transisi demokrasi. Mereka diantaranya adalah kolega kalangan kader partai Golkar yang saya wawancarai yaitu Musfihin Dahlan mantan Sekjen Golkar periode 1998-2004, Hajriyanto M. Thohari selaku juru kampanye partai Golkar saat pemilu 1999, Mahadi Sinambela mantan Sekjend Golkar, Ibrahim Ambong, dan Akbar Tandjung sebagai narasumber primer, atau aktivis, ormas – ormas yang bersangkutan dengan judul penelitian ini

(2) Kritik terhadap data atau sumber sejarah. Pada tahapan ini penulis diharuskan melakukan kritik atas beberapa sumber yang didapat. Kritik sumber dimaksudkan untuk membuktikan apakah sumber tersebut benar-benar valid. Kritik dibagi menjadi dua bentuk; (a) kritik ekstern, yaitu kritik yang digunakan untuk mengkritisi data atau sumber sejarah dilihat dari bentuk secara fisik. (b) kritik intern, yaitu kritik yang digunakan untuk mengkritisi data atau sumber sejarah dilihat dari isi atau substansi data atau sumber sejarah tersebut.

(3) Interpretasi, yaitu proses analisis dari data atau sumber sejarah yang telah didapat. Proses tersebut juga dapat disebut sebagai proses penafsiran data atau sumber sejarah sesuai dengan fakta – fakta yang telah peneliti dapatkan. Dengan kata lain fakta sejarah yang terkumpul harus di transformasikan menjadi evidensi atau bukti dalam suatu struktur argument. Transformasi fakta pada data

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng, 1999), hlm. 94-98.

menjadi evidensi dapat dilakukan dengan menggunakan interpretasi, konsep-konsep, hipotesis dan teori.

(4) Historiografi atau proses penulisan sejarah. Proses penulisan sejarah juga harus mensistesisikan sumber-sumber terkait dalam kisah sejarah guna merekonstruksi peristiwa masa lampau dalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis, logis, dan ilmiah, atau dengan kata lain dalam bentuk penulisan sejarah kritis dengan menggunakan penulisan deskriptif analitis.⁴⁵

1.8 Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, dalam Bab 1 ini terdiri dari beberapa bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, tinjauan pustaka, pendekatan dan kerangka teori, metode penulisan, sistematika penulisan sejarah.

Bab 2 Sejarah dan Dinamika Politik Golkar, yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab, yang dimulai dari bab Kelahiran Sekber Golkar Pada Era Demokrasi Terpimpin, bab selanjutnya Golkar Pada Masa Orde Baru, yang terdiri dari dua sub bab yaitu, Eksistensi Golkar selama Orde Baru, Golkar, Harmoko, dan Detik-detik Lengsernya Soeharto, bab selanjutnya Golkar Awal Reformasi, yang terdiri dari dua sub bab yaitu, Menuju Munaslub Golkar (Detik-detik Terpilihnya Akbar Tandjung), Kemenangan Akbar Tandjung Sebagai Ketua Umum Golkar, bab selanjutnya Metamorfosis Golkar (Perubahan Kestrukturan Partai Golkar) yang terdiri dari dua sub bab yaitu Perumusan RUU Politik 1999, Tantangan Golkar pada Pergeseran Politik.

Bab 3 Golkar Baru dan pemilu Pada Pasca Reformasi, yang terdiri dari beberapa bab yang dimulai dari bab langkah Akbar Tandjung Menyelamatkan Golkar Dengan Paradigma Baru, bab selanjutnya Tantangan Partai Golkar Menghadapi Pemilu 1999, bab selanjutnya Strategi Partai Golkar menghadapi Pemilu 1999 dengan sub bab Langkah Akbar Tandjung dalam Pembentukan sayap pendukung Golkar, Langkah Partai Golkar Dalam menguasai Opini di Media

⁴⁵Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah* , Terjemahan Nugroho Susanto, (Jakarta: UI Press,1986), hlm.18-19.

Sebagai Strategi memperoleh Simpati Masyarakat pada Pemilu 1999, Pengaruh Ketokohan Akbar Tandjung, Stategi Akbar Tandjung Dalam Konsolidasi Nasional Untuk membangun Golkar Baru, Strategi Golkar Dalam Mendulang Suara Pada Basis Massa NU, bab selanjutnya Partai Golkar dan Pemilu 1999.

Bab 4 Kesimpulan



BAB 2

SEJARAH DAN DINAMIKA POLITIK GOLKAR

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai sejarah Golkar dan Dinamika Politik Golkar dari awal terbentuknya Golkar sampai eksistensinya pada masa Orde Baru dan menjelang reformasi. Tinjauan sejarah ini mencakup periode memasuki Orde Baru hingga menjelang reformasi. Pembentukan Golkar ini sampai eksistensinya terjadi melalui proses panjang selama dua periode. Tujuan bab ini adalah menunjukkan bagaimana Golkar bisa dibentuk dan akhirnya sangat mempengaruhi perkembangan dinamika perpolitikan di Indonesia maupun sampai menjelang reformasi.

Golkar yang semula bernama Sekertaris Bersama (Sekber) dengan menaungi tujuh kino yang terbentuk dalam organisasi kemanusiaan pada masa itu sampai menjadi partai organisasi sosial politik. Terkait dengan kondisi politik saat itu dan perubahan dunia internasional, terutama jatuhnya Soekarno dan perubahan sistem liberalisasi dunia. Golkar merupakan kelompok organisasi sosial dan kemudian berbentuk partai yang secara terstruktur yang dibentuk oleh orang – orang militer, berpotensi mendapat dukungan blok pemilih satu tahap penting dalam persaingan politik dimulai dari 1971 sampai berakhirnya pemilu ala Orde Baru 1999.

Oleh sebab itu, bab ini dibagi menjadi tiga bagian utama. pertama yaitu Golkar pada masa Orde Baru. Dimana pada sub bab ini penulis menjelaskan bagaimana sejarah partai ini dibentuk dan kemudian peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, setelah peralihan kekuasaan ini Golkar memanfaatkan

berbagai peran strategis untuk mempertahankan dan memenangi pemilu selama Orde Baru. Bagaimana peran strategis itu semua partai politik dibungkam secara politik oleh pemerintahan Orde Baru.

Pada bagian kedua, yaitu Partai Golkar pada awal reformasi. Di sub bab ini menjelaskan ketika Partai Golkar memasuki era reformasi, ketika semua kekangan politik dilepas, berbagai partai politik yang telah terbentuk menemukan saluran politiknya yang cocok. Permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Golkar pasca lengsernya Soeharto dan demokratisasi politik disini, menyangkut perubahan situasi politik Partai Golkar, terutama konflik internal di Golkar sendiri dan dengan organisasi-organisasi politik lainnya dalam proses transisi politik di Indonesia. Dalam konteks ini, perubahan yang dimaksud adalah perubahan visi, misi, dan struktur organisasi Golkar baru, karena merupakan salah satu solusi untuk memutuskan hubungan Golkar dengan Orde Baru.

Bagian ketiga, yaitu secara konseptual reformasi terjadi pada objek-objek perubahan sistem politik, struktur kekuasaan, dan kebijakan dalam menangani masalah politik. Sub bab ini menjelaskan tentang bagaimana Partai Golkar dalam menghadapi kebijakan undang-undang politik yang baru atas desakan tuntutan publik untuk penyelenggaraan Pemilu 1999. Kebijakan undang-undang politik ini, salah satunya tentang netralitas birokrasi dan peran militer dalam Pemilu dihapuskan. Sebagaimana diketahui dua kelompok ini memiliki peran pada Golkar masa rezim Orde Baru, dan sekarang tidak lagi memberikan perlakuan istimewa kepada partai tertentu.

2.1 Kelahiran Sekber Golkar Pada Era Demokrasi Terpimpin

Pembentukan organisasi Golkar pertama kali diinisiasi oleh Jendral Nasution dan beberapa rekannya di militer membuat suatu rencana untuk membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) sebuah organisasi yang digunakan untuk menyeimbangi kekuatan kelompok komunis.¹ Pada Tanggal 15 Oktober 1964 mereka mengundang Kelompok

¹Farchan Bulkhin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Pilihan Artikel Prisma* (Jakarta; LP3ES,1991), hlm. 268.

Cendekiawan, dan Militer untuk mempersiapkan sebuah pembentukan panitia Sekber Golkar. Pada tanggal 16 Oktober 1964 terbentuklah panitia yang terdiri dari sembilan orang yang kemudian yang disebut sebagai kelompok panitia 9 (sembilan) yang terdiri dari Brigjend TNI Djuhartono, J.K Tumakaka, Drs. Imam Pratigny (Ketiga orang tersebut merupakan pemrakarsa nama Sekber Golkar), Dominggus Nanlehy, Pandu Kartwiguna, Kol. Dr. Amino Gondohutomo, Sutomo Honggowongso SH, Z. Efendi SH., dan Anwar Rasyid. Pada tanggal 19 Oktober 1964, kelompok panitia sembilan tersebut menandatangani “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan” yang dihadiri oleh kurang lebih 35 golongan karya non afiliasi. Pada tanggal 20 Oktober 1964 Sekber Golkar telah resmi terbentuk dan ketuanya adalah Kolonel Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-masing adalah Imam Pratigny (NU), J. K. Tumakaka (pernah menjadi pemimpin PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam). Berikutnya Dr. Amino Gondohutomo bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris.²

Terbentuknya Sekber Golkar merupakan kekuatan baru bagi kelompok ABRI yang melihat penggabungan tiga ideologi yang disebut NASAKOM (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) yang diterapkan oleh Soekarno. Penerapan gabungan ketiga ideologi ini dimanfaatkan oleh PKI yang dengan leluasa menanamkan ideologi komunismenya ke masyarakat hingga pelosok ke pedesaan sehingga apa yang diinginkannya untuk menggalang dukungan massa yang semakin kuat. Kehadiran organisasi massa yang dibentuk militer saat itu hanyalah Serikat Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI), Koperasi Gotong Royong (Kosgoro), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sebagai tandingan Serikat Organisasi Buruh Sosialis Indonesia (SOBSI) dibawah PKI.³ Ketiga organisasi massa dibawah kelompok fungsional militer ini dikenal sebagai kelompok fungsional Trikarya yang menjadi fondasi organisasi Golkar.

² Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer-Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta; LP3ES, 1992), hlm.15.

³*Ibid.*, hlm.19.

Masing-masing organisasi Trikarya ini memiliki tujuan untuk menekan dan mencegah bagi penguatan kekuatan massa di pihak PKI dan menjadi cikal bakal terbentuknya Sekber Golkar yang menjadi fondasi organisasi Golkar pada masa Orde Baru sebagai mesin politik pemerintahan Soeharto.

2.2 Golkar Pada Masa Orde Baru

Kehidupan sosial-politik Indonesia seakan terguncang dahsyat ketika pada malam 30 September 1965 (1 Oktober dini hari) terjadi sebuah gerakan penculikan para pejabat tinggi militer. Enam Jenderal senior dan satu perwira pertama tewas akibat insiden berdarah ini. Akibatnya, terjadi perubahan yang sangat menentukan bagi perjalanan politik bangsa. Pada peristiwa ini menyebabkan PKI dituduh terlibat dan mendalangi gerakan yang disebut dengan gestapu ini, dan dilain pihak popularitas Soekarno merosot tajam, kepercayaan rakyat pun menurun sehingga Presiden Soekarno terancam tumbang dari kursi kekuasaannya.⁴ Beberapa tahun setelah peristiwa 30 September itu, gerak langkah militer menuju kursi kekuasaan semakin tidak terbendung, karena dua kekuatan penyeimbangannya, Presiden Soekarno dan PKI telah ikut “tenggelam” pasca terbunuhnya perwira-perwira militer pada malam itu. Oleh sebab itu semenjak akhir tahun 1965, ABRI menjadi satu-satunya kekuatan politik yang didominasi Jenderal Soeharto menduduki kekuasaan Indonesia melalui mandat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966. Pada tanggal 12 Maret 1967 MPRS menunjuk Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI menggantikan Presiden Soekarno.

Pergantian Pimpinan Dewan Harian Sekber Golkar pertama kali dilakukan dengan mengadakan Rapat Dewan Pimpinan Harian Sekber Golkar pada 14 Maret

⁴ Suara Merdeka, 6 Oktober 1965, *Jenderal Ahmad Yani Alm. dinyatakan Sebagai Pahlawan Revolusi*, hlm. 1, Leo Suryadinata, op.cit, hlm. 18-21, David Bourchier dkk (ed), *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2006), hlm. 41. Berbagai pendapat muncul terkait dengan “Gerakan September” berdarah ini, diantaranya adalah dari kalangan tentara sendiri yang menyebut PKI sebagai sutradara, kemudian “Cornell Paper”, yang menganggap PKI sama sekali tidak terlibat dalam gerakan tersebut, sampai pada tuduhan kepada dua mantan presiden berpengaruh Indonesia, Soekarno dan Soeharto sebagai aktor dibalik G 30 S itu.

1966. Hal ini disebabkan kekosongan pimpinan Sekber Golkar yang tidak lagi dipimpin oleh Brigjen Djuhartono. Penyebabnya adalah ditarik kembalinya Brigjen Djuhartono sebagai Staff Umum Angkatan Darat (SUAD).⁵ Melalui Rapat Dewan Pimpinan Harian Sekber Golkar dengan suara bulat memilih Mayor Jendral Soeprapto Sukowati sebagai Ketua Umum Sekber Golkar (1966-1973). Pergantian kepemimpinan ini dimaksudkan sebagai langkah persiapan menghadapi Pemilu 1971.

Setelah mendapatkan mandat dan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-dua, Soeharto tidak mempercepat Pemilu yang diusulkan oleh parlemen DPRS/MPRS. Hal ini bagi Soeharto bahwa apabila secara gegabah mengadakan Pemilu, meskipun Soekarno bukan lagi menjadi Presiden namun dikhawatirkan akan timbul usaha-usaha dari rakyat yang masih bersimpati terhadap Soekarno untuk mengembalikannya menjadi Presiden Republik Indonesia kembali.⁶ Hal ini disebabkan kekuatan pro Soekarno masih besar terutama Jendral-Jendral yang ada di dalam Sekber Golkar.⁷ Oleh sebab itu awal Rezim Orde Baru mengambil langkah untuk ditundanya Pemilu pada Januari 1968 dengan alasan disebabkan permasalahan teknis menjadi tidak mungkin untuk mengadakan Pemilu pada tanggal yang telah ditentukan MPRS yaitu pada tanggal sebelum atau sesudah 5 Juli 1968.⁸ Adanya penundaan Pemilu tersebut dimanfaatkan oleh rezim Orde Baru untuk mengambil dukungan dari masyarakat yaitu dengan mempercepat pembangunan ekonomi melalui REPELITA 1 (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

⁵ Imam Pratigny, *Ungkapan Sejarah: Lahirnya Golongan Karya, Perjanjian menegakkan kembali Negara Proklamasi 17-8-1945*, (Jakarta; Yayasan Bhakti, 1983), hlm.116.

⁶ Leo Suryadinata, *Op.Cit.*, hlm.28-29.

⁷ Ibrahim Ambong, “ Hubungan ABRI-Golkar “ di dalam jurnal *ilmu politik* , vol 6, (Jakarta; Gramedia, 1990), hlm. 36.

⁸ M Nishihara, *Golkar and the Indonesian Elections of 1971*, (Jakarta; CSIS, 1972), hlm.52.

Langkah Soeharto ini pada awalnya tidak menginginkan secara langsung sistem pemerintahannya bercorak rezim militeristik, melainkan sebuah rezim yang didukung dan memperoleh legitimasi terlebih dahulu melalui Pemilu agar pemerintahannya nantinya dapat mengontrol dan mengamankan posisi Rezim Orde Baru. Oleh sebab itu, militer membesarkan Golkar karena hadirnya organisasi politik yang kuat dibutuhkan bagi tercapainya pembangunan yang dicita-citakannya. Pada posisi ini Golkar mulanya selalu ingin dibedakan dengan partai politik lainnya, karena merasa ikut andil dalam merencanakan pembangunan yang diharapkan oleh Rezim Orde Baru, walaupun fungsi-fungsi yang dimainkannya tidak berbeda dengan partai politik lainnya. Guna untuk memperkuat posisi politik Golkar di pemerintahan Orde Baru maka ia bersinergi dengan ABRI, sehingga semakin memperkuat hubungan diantara keduanya. Soliditas antara ABRI dan Golkar semakin memperkuat posisi Orsospol tersebut.

Pada pelaksanaan Pemilu 1971 Sekber Golkar berhasil menduduki kursi parlemen (DPR) dengan 236 kursi dari jumlah suara sebesar 34.348.673 juta suara atau 62,8 % dari keseluruhan total suara. Keberhasilan Sekber Golkar mengalahkan pesaingnya yaitu Seperti Partai Nahdhatul Ulama (NU) yang mendapatkan suara 10.213.650 atau 18,67 % dari total jumlah suara. Sedangkan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) mendapatkan 3.793.266 suara atau 6,94% dari total suara. Kemenangan Sekber Golkar dalam Pemilu 1971, melalui proses musyawarah menghasilkan keputusan Ketua Umum Sekber Golkar Nomer: KEP/101/VII/Golkar/1971 yang menetapkan perubahan Sekber Golkar menjadi Golkar pada tanggal 17 Juli 1971. Pada bulan September 1973 Munas 1 Golkar diadakan di Surabaya dan menghasilkan Amir Moertono sebagai Ketua Umum Golkar (1973-1983). Agenda politik saat itu adalah pembentukan pengelompokan baru gabungan Organisasi Kino yang terdiri dari SOKSI, MKGR, KOSGORO, Ormas Hankam, Organisasi Karya Pembangunan, Profesi dan Gabungan Karyawan Republik Indonesia (Gakari) beserta ABRI dan Korpri di bawah payung Golkar yang diharapkan dapat menjadi lebih terorganisir didalam kegiatan politiknya. Enam bulan setelah agenda Munas Golkar dalam rangka untuk menyukseskan kepemimpinan Rezim Orde Baru, organisasi Golkar merangkul

organisasi masyarakat seperti membentuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Perluasan organisasi kemasyarakatan yang digalang ini untuk memperkokoh dukungan terhadap Rezim Orde Baru dan untuk persiapan Pemilu-Pemilu selanjutnya.

Dalam perjalanannya lebih lanjut dengan kekuatan dukungan Golkar yang kuat terhadap pemerintahan Orde Baru, Soeharto menganggap sistem kepartaian yang ada saat itu dengan 9 partai politik dan 1 Golkar kurang efektif dalam menjalankan pemerintahan. Dimulai dari politik Fusi tahun 1971 dilakukan apa yang disebut sebagai masa penyederhanaan partai dibawah komando Ali Murtopo. Maka dilakukan perombakan struktur politik dan langkah pertama yang di tempuh adalah pengelompokan partai – partai yang ada ke dalam dua kelompok : material – spiritual dan spiritual – material. Kelompok pertama, terdiri dari partai yang menekankan pembangunan material dan tanpa mengabaikan aspek spiritual, yaitu, PNI, MURBA IPKI, Partai Katolik dan Parkindo. Sedangkan kelompok kedua, terdiri dari partai – partai yang menekankan pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek material, yaitu Partai NU, Parmusi, PSSI.⁹ Pada akhirnya 9 partai politik ini difusikan, menjadi dua partai politik besar pada 5 Januari 1973, yaitu kelompok spiritual – material, yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti menyatakan bergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian terbentuklah PPP pada Februari 1973, dan PNI, MURBA IPKI, Partai Katolik dan Parkindo membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terbentuk pada tanggal 10 Januari 1971. Hasil pengelompokan ini kemudian di bakukan dalam UU nomer 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golongan karya, yang menetapkan berlakunya hasil penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia dengan hanya dua partai politik : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai golongan karya (Golkar).

⁹Kang Young Soon, *Antara Tradisi Dan Konflik: Kepolitikan Nahdhatul Ulama, 1984-1999*, disertasi , (Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2002), hlm.129.

2.2.1 Eksistensi Golkar

Sepanjang Pemilu Orde Baru, dari Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997, Golkar secara terus-menerus memenangi Pemilu. Dukungan pemerintah sangat nyata bagi kemenangan Golkar dalam Pemilu – Pemilu Orde Baru, kemenangan terus-menerus ini memang lekat dengan faktor rekayasa politik, termasuk melalui cara – cara pemaksaan dan represi para aparat negara. Mekanisme tersebut mulai berkurang dalam proses kemenangan – kemenangan Golkar pada Pemilu setelahnya.¹⁰

Setelah itu diperiode ketiga dijalani Golkar antara 1971 – 1978: (1) menjadi mesin politik penghasil legitimasi bagi kekuasaan Orde Baru ; dan (2) memassalkan ideologi pembangunan dalam kerangka modernisasi;(3) menenggelamkan sistem kepartaian. Dalam periode singkat ini Golkar menjadi “ kelompok strategisyang bersama- sama elemen Orde Baru lainnya membangun aliansi besar bagi otorianisme baru.¹¹

Munas II Golkar di Denpasar, Bali, pada oktober 1978, membuka langkah Golkar memasuki periode keempat kehidupannya. Inilah periode panjang – dua dekade (1978 – 1998) – yang memposisikan Golkar sebagai instrumen kekuasaan personal Soeharto, sementara anasir – anasir Orde Baru lainnya (militer, birokrasi, teknokrasi, dan kekuatan modal) di posisikan menjadi instrumen kekuasaan personal Soeharto.¹²

Golkar yang selama dua dekade akhir Orde Baru itu menjadi pemberi bobot legitimasi politik riil bagi kekuasaan personal Soeharto. Dengan memposisikan Golkar secara instrumental, Soeharto mengumpulkan kapabilitas sebagai penguasa tunggal yang memegang tali kendali politik secara efektif. Organisasi sosial politik ini sengaja di bangun sebagai mesin politik penguasa yang merupakan pengumpul suara terbesar dalam setiap kali Pemilu, tapi

¹⁰ Nanang Dwi Prasdi, DKK, *Golkar Retak*, (Jakarta; Sembrani Aksara Putra. 1999), hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*, hlm. Ix.

¹² *Ibid.* hlm. 109.

ketuanya tidak pernah menjadi Presiden, paling maksimal hanya jadi Wakil Presiden dan terjadi pada waktu Ketua Umum Golkar dipegang Sudharmono. Pada masa kepemimpinan Sudharmono partai Golkar cenderung mandiri karena mayoritas semua kader Golkar di isi oleh tokoh-tokoh ABRI dan hampir 80 persen ketua DPD Golkar seluruh Indonesia berasal dari kelompok seragam hijau dan inilah yang dinamakan strategi seragam hijau mengepung kota.¹³

Selanjutnya Wahono menggantikan Sudarmono sebagai Ketua Umum Golkar, karena pertimbangan dari Soeharto sebagai dewan pembina Golkar. Wahono merupakan orang dekat dan kepercayaan Soeharto selama di Golkar. Pengangkatan Wahono menjadi Ketua Umum dianggap tidak sesuai oleh pertimbangan Golkar khususnya di tataran ABRI, karena tidak menguasai politik dan tidak sewibawa Sudarmono. Wahono sadar dengan dirinya yang tidak didukung oleh beberapa kalangan ABRI di jajaran Golkar. Maka Wahono memanfaatkan agenda “konsolidasi organisasi” untuk tetap mengukuhkan posisinya, yaitu melakukan konsolidasi dari faksi jalur B (Birokrasi) dan jalur G (Golkar). Wahono melakukan aliansi dengan Sudharmono karena masih berpengaruh dari faksi jalur G (Golkar) yang dipegang dari golongan orang sipil dan merangkul L.B Moerdany dari jalur A (ABRI) / dipihak ABRI-nya.

Golkar pada masa Orde Baru tidak hanya melahirkan organisasi internal yang berada di naungan Golkar atau tujuh Kino yang berawal dari Sekber Golkar yang menjadi *Onderbouw*nya Golkar misal SOKSI, MKGR, Kosgoro, atau ormas lainnya. Demikian pula Golkar juga ikut andil dalam memajukan program – program PELITA (Pembangunan Lima Tahun) sejak dirumuskannya PELITA I – VI.¹⁴ Golkar sebagai partai yang besar, penuh kuasa, dan dinamika sepanjang Orde Baru dengan tetap berkuasanya Soeharto sebagai Presiden RI dan Dewan tertinggi Petimbangan Partai Golkar. Pada masa Wahono sebagai Ketua Umum, Soeharto mulai memberikan peran terhadap individu – individu yang berlatar belakang”

¹³*Ibid.*, hlm. 11.

¹⁴Arbi Sanit, *Sistem Politik Indoensia : Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan.* (Jakarta; Rajawali Press. 1986.),hlm. 72.

Islam formal” untuk terlibat aktif di organisasi politik ini. Puncaknya saat Soeharto merestui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), B.J Habibie dipilih sebagai Ketua Umumnya, dan ICMI pun ikut di gunakan sebagai *Ruler's Party* agar ormas islam tetap memilih Golkar.¹⁵

2.2.2 Golkar, Harmoko, Dan Detik – Detik Lengsernya Soeharto

Sebagai organisasi politik yang selalu menyangga tampuk kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun, mestinya Golkar di tuntutan pertanggung jawabnya atas semua yang terjadi di Indonesia ini. Sebagai Ketua Umum saat itu Harmoko sudah dianggap gagal mengemudikan Golkar. Pemilihan Harmoko sebagai Ketua Umum tidak luput dari dukungan B.J Habibie dan kelompoknya saat menjelang Munas V Golkar tahun 1993, pada saat itu ia sebagai Ketua Presidium Pelaksana Harian Dewan Pembina Golkar dan sekaligus sebagai penyusun BP MPR. Terpilihnya Harmoko sebagai Ketua Umum periode 1993-1998 merupakan kali pertama posisi ketua umum dipegang oleh sipil, yang biasanya posisi ini di isi dari tokoh-toko militer.¹⁶ Harmoko harus mengakomodasi beragam kelompok yang ada, antara lain “kelompok B.J Habibie” dan “kelompok militer”. Faksi politik bisa dirasakan, tatkala”kelompok militer” sering mengkritik gaya kepemimpinan Harmoko yang dinilai lebih condong ke kelompok Habibie.

Di tahun akhir kepemimpinan Harmoko sebagai Ketua umum terjadi perseteruan di Golkar antara anak-anak Soeharto dengan kubu Habibie –Harmoko ketika menjelang Pemilu 1998, dan saat uji sah GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang merupakan proyek bergengsi dan strategis. Pada Sidang Umum MPR 1998 Presiden Soeharto (Ketua Dewan Pembina Golkar) dicalonkan kembali sebagai Presiden RI ke enam kalinya. Penguatan pencalonan kembali Soeharto

¹⁵ Riswanda Imawan, *Menggugat Kemandirian Golkar*. (Yogyakarta; Bigraf Publishing. 1996.), hlm.30

¹⁶ Rully Chairul Azwar, *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era : Dari Partai Hegemonik ke Partai Berorientasi Pasar*(Jakarta; Gramedia Pustaka utama, 2009) , hlm. 43.

sebagai Presiden sepanjang Orde Baru sejalan dengan terjadinya krisis moneter dan meningkatnya suhu politik nasional. Tekad bulat Harmoko menanggapi permintaan Soeharto untuk dinaikkan menjadi Presiden kembali itu menuai kritik dan lontaran yang menuai banyak resistensi dari berbagai kalangan. Di saat yang sama krisis moneter yang terjadi pada 1997 sampai 1998 tidak bisa diatasi, melihat gejolak moneter ini sebagai imbas dari kegiatan monopoli dan oligopoli kroni – kroni Soeharto.¹⁷

Harmoko sebagai ketua umum Golkar, setelah sidang MPR 1998 mengatakan bahwa, akibat kondisi masyarakat dan krisis ekonomi, Golkar dihadapkan pada kondisi yang sulit. Kelalain Soeharto termasuk para penasihat ekonominya terutama bidang moneter lemah dalam membaca peta ekonomi moneter padahal krisis ini pernah terjadi pada tahun 1994 dan Indonesia mampu keluar dari krisis ini. Melihat krisis ekonomi yang melanda kawasan ASEAN ini termasuk Indonesia, maka pemerintah melakukan perubahan sistem nilai tukar mata uang di kawasan ASEAN terhadap dolar AS.

Sementara itu untuk mendukung kinerja moneter, pemerintahpun akhirnya mengundang Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) untuk membantu masalah finansial. Adanya beberapa syarat yang diajukan IMF diantaranya yaitu, Pemerintah harus memperbaiki dan menguatkan sistem perbankan, meningkatkan daya saing dan efisiensi BUMN dan swasta, kebijakan fiskal diarahkan untuk mengurangi defisit anggaran dan pemantapan kebijakan kurs rupiah. Pada akhirnya Indonesiapun setuju, dan diikuti oleh kebijakan IMF memberikan dana pinjaman sebesar 10 milyar dolar AS dari total 43 milyar dolar AS. Kebijakan pemerintah ini sesuai dengan kesepakatan IMF seolah – olah satu – satunya strategi untuk menanggulangi krisis dan pemulihan ekonomi Indonesia.¹⁸

¹⁷ Nanang Dwi Prasdi. *Op.Cit.*, hlm. 61.

¹⁸ Mc Ricklef. *Sejarah Indoensia Modern 1200 – 2004.*(Jakarta, Ikrar Mandiri Abadi, 2004), hlm. 82.

Berbagai isu dan seputar kesehatan Soeharto dan jatuh temponya pembayaran utang swasta, membuat kurs rupiah terus merosot, dan ingkar janjinya Soeharto dengan IMF, seperti kasus monopoli beras dan komoditi lainnya oleh Bulog. Pada titik ini mulai muncul berbagai reaksi masyarakat dan akibatnya, pada bulan Februari tahun 1998 terjadi penjarahan bahan sembako dan aksi pemborong besar – besaran terhadap bahan kebutuhan pokok di hampir semua pasar dan swalayan akibatnya bergulirnya isu pemotongan nilai rupiah.

Pada 18 Mei 1998 ribuan mahasiswa mendatangi gedung DPR/MPR untuk menyampaikan aspirasi mereka yaitu Soeharto harus mundur dari kursi Presiden, Pimpinan DPR/MPR segera menggelar rapat pleno. Akhirnya tuntutan agar Soeharto turun kemudian juga di suarakan oleh Harmoko selaku Ketua MPR dan sekaligus Ketua Umum Golkar, pernyataan Harmoko di MPR RI tersebut membuat beberapa kalangan pengurus dewan pertimbangan Golkar meragukannya, karena jelas – jelas dianggap bertolak belakang apa yang disampaikan dalam Sidang Umum MPR 1998 pada tanggal 11 Februari 1998 menyatakan Presiden Soeharto (Ketua Dewan Pembina Golkar) dicalonkan kembali sebagai Presiden keenam kalinya.¹⁹

Pernyataan Harmoko ini didukung oleh beberapa partai yang ada di parlemen khususnya partai yang difusikan seperti, Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pernyataan Harmoko setelah rapat pleno MPR/DPR menurut Ary Mardjono selaku Sekjen DPP Golkar waktu itu menyatakan bahwa pernyataannya itu adalah pernyataan pribadi dan bukan pernyataan dari segenap DPP Golkar. Berlarut – larut perpecahan yang melanda Golkar, dan Harmoko disalahkan oleh lawan politiknya di internal partainya karena tidak memperhatikan iklim politik Jakarta yang semakin memburuk, pada tanggal 21 Mei 1998 sehingga Soeharto turun dan digantikan oleh wakilnya B.J Habibie.²⁰

¹⁹ M. Alfian Alfian. *Memenangkan Hati Rakyat :Golkar Dan Akbar Tandjung 1998 – 2004*(Jakarta . PT Bende Press.2004), hlm. 17.

²⁰ *Ibid.* hlm. 8.

Pasca Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden, Golkar berlarut – larut mengalami kemelut yang tidak terhindarkan yaitu terjadinya konflik di internal maupun eksternal, begitupun kelompok ABRI yang berada di Golkar mengalami perpecahan. Dari momentum inilah muncul sosok Akbar Tandjung yang waktu itu menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan juga merupakan Sekretaris I Dewan Pembina Golkar, dan ia mulai memainkan peran strategisnya menggelar politik akomodasi untuk persiapan Munaslub.

2.3 Golkar Awal Reformasi

Soeharto setelah jatuh, maka Golkar pun ikut kena imbasnya, para reformis selain menginginkan tuntutan Soeharto lengser, juga menginginkan partai “ Pohon Beringin” ini pun ingin di bubarkan, karena merupakan partai penyokong utama Orde Baru dan dianggap bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Reaksi masyarakat cukup luar biasa terhadap Golkar, tidak hanya di Jakarta tetapi para demonstran hingga di daerah-daerahnya menuntut agar partai tersebut dibubarkan dan Ketua Umum Golkarnya diadili.

Reaksi kaum reformis terutama mahasiswa yang menyampaikan segala aspirasinya yang mewakili keinginan masyarakat Indonesia meminta segala sesuatu yang berbau Soeharto berikut kendaraan politiknya harus di reformasi. Tak hanya itu, dari berbagai aspek baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Isusosial dan ekonomi yang sebelumnya mendominasi berbagai demonstrasi digantikan oleh tuntutan perubahan politik. Pada saat disumpah sebagai presiden, Habibie menjanjikan percepatan pelaksanaan Pemilu tapi tidak menyebutkan percepatan pelaksanaan jadwal yang jelas.²¹

Disisi lain Golkar menghadapi perubahan politik ini menuai banyak tantangan bersamaan dengan gejolak konflik internal Golkar untuk segera melakukan reformasi Golkar sesuai dengan kondisi transisi politik Indonesia. Tekanan politik tersebut secara fundamental akan terus berlangsung apabila

²¹ Kuskrido Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel : Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* ,(Jakarta ;Pustaka Gramedia , 2009), hlm. 96.

Golkar tidak menunjukkan tanda – tanda perubahan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Manuver politik Ketua Umum DPP Golkar Harmoko yang memicu polarisasi internal Golkar yang menyatakan berbalik arah dari komitmen sebelumnya antara kubu yang mendukung Soeharto mundur dan kubu yang menentangnya. Maka dalam wacana polarisasi konflik tersebut setidaknya segera mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar, yang diselenggarakan di Jakarta, 3 Juni 1998, untuk merespon dinamika politik Golkar pasca jatuhnya Soeharto.

Pada Rapimnas yang dihadiri oleh 27 DPD, diwarnai oleh perdebatan yang meminta Harmoko mundur karena dosa konstitusional,²² dan bagaimana memposisikan Golkar ditengah perubahan politik yang terjadi. Selanjutnya tuntutan mundur Harmoko ini dirancang melalui ide menggelar Munaslub, karena permintaan beberapa DPD Golkar yang meminta untuk segera Munas diantaranya didukung oleh 23 DPD dan 4 DPD lainnya memilih abstain.²³

Pada Rapimnas itu terdapat dua kelompok yang saling berhadapan diantaranya kelompok yang meminta agar Harmoko mundur dan yang tidak. Kelompok yang mendukung Harmoko dapat memahami dan tidak terlampaui mempersoalkan sikap dan langkah politik Harmoko saat itu, karena terkait dengan situasi politik yang berkembang saat itu. Sedangkan kelompok yang menghendaki Harmoko agar mundur berasal dari kelompok yang dekat dengan Soeharto dan Edy Sudrajat dan menurut mereka adalah ia selaku Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar tidak memberi arahan untuk memberikan petunjuk ke daerah-daerah soal bagaimana menyikapi perkembangan politik Jakarta yang bergerak dari detik per detik, sehingga kondisi ini menyebabkan Golkar sempat disorientasi.

²² Menurut Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan, Kolonel (Purn) Soenarso mengatakan hal tersebut waktu Rapim, karena Harmoko tak pernah mengeluarkan keputusan apapun ataupun sikap organisasi menghadapi tuntutan reformasi masyarakat, tapi kemudian ia mengatasnamakan DPP untuk mengeluarkan pernyataan. Nanang Dwi Pradi, DKK., *Golkar Retak*. (Jakarta ;Sembrani Aksara Putra, 1999), hlm. 105.

²³ M.alfan Alfian *Op.Cit.*, hlm. 43

Tudingan ketua DPD – DPD antar daerah terhadap Harmoko yang menganggapnya sebagai kesalahan fatal padahal seharusnya sesuai mekanisme organisasi ia melakukan komunikasi atau pengarahan ke daerah – daerah untuk mengeluarkan keputusan apapun sebagai sikap organisasi menghadapi tuntutan reformasi masyarakat. Tak ayal dalam forum Rapim boleh dikatakan merupakan pengadilan kedua Harmoko karena memberikan pernyataan Soeharto harus lengser. Desakan mundur kepada Harmoko sebenarnya sudah dirancang DPD – DPD yang mayoritas dipimpin oleh purnawirawan TNI.

Akhirnya Rapim yang diikuti oleh 27 DPD – DPD dan pengurus DPP menyepakati menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) selambat – lambatnya tanggal 9 – 11 Juli 2008. Agenda yang dibicarakan dalam Rapim yang akan dibawa dalam Munaslub Golkar adalah perubahan AD / ART dan segala sesuatu yang menyangkut reformasi Golkar sesuai dengan tuntutan politik pasca Soeharto lengser. Rapimnas juga menghasilkan butir – butir keputusan antara lain :

- Menyikapi semangat reformasi, Golkar sesuai doktrinnya tetap menjalankan reformasi di segala bidang, namun proses reformasi dilakukan secara konstitusional, demokratis, tertib, etis dan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang kukuh.
- Dalam melaksanakan reformasi, baik secara organisasi maupun struktural, Golkar tetap konsisten terhadap karya dan kekaryaan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta wawasan kebangsaan.
- Guna menegakkan rasa percaya diri terhadap jati diri dan idealisme serta tujuan Golkar tersebut, diserukan kepada kader – kader Golkar untuk mengadakan konsolidasi baik organisasi, ideal maupun wawasan dari tingkat pusat sampai ke daerah – daerah dengan tetap berpedoman pada AD / ART Golkar.
- Sehubungan dengan kehidupan dan kondisi pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi yang memprihatinkan saat ini, diserukan kepada kader – kader Golkar untuk meningkatkan upaya dalam kapasitasnya masing – masing turut mengatasi dan memperbaiki kondisi

perekonomian Indonesia yang sudah sangat mendesak kebutuhan penanggulangannya.

- Dalam mengantisipasi bidang politik, Golkar sependapat dan mendukung percepatan pelaksanaan Pemilu dan penyelenggaraan Sidang MPR secara konstitusional.²⁴

Belakangan disebut –sebut memang ada 5 calon yang namanya makin mengemuka. Mereka diantaranya adalah Edi Sudrajat, Sri Sultan HB X, Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita, Try Sutrisno. Ada yang mengusulkan agar tokoh Keluarga Besar ABRI (KBA) duduk kembali ke Golkar dengan memunculkan Agum Gumelar dan Hendropriyono juga Kasospol ABRI, Susilo Bambang Yudhoyono.²⁵

2.3.1 Menuju Munaslub Golkar : Detik – Detik Terpilihnya Akbar Tandjung

Setelah tercapai kesepakatan Munaslub dipercepat yaitu tanggal 9 – 11 juli 1998, maka sebagai strategi untuk mencari kepemimpinan baru Golkar haruslah sesuai dengan keadaan zaman yaitu harus membenahi semua sistem, baik di tubuh Golkar maupun di pemerintahan nantinya. Rapimnas telah dilakukan dan kini Harmoko harus berpikir keras dalam Munaslub sebab posisinya yang kini dipertaruhkan. Harmoko dalam Munaslub bila mengundurkan diri dan tidak mencalonkan kembali maka posisinya sebagai Ketua MPR / DPR juga ikut terancam. Padahal ia masih mempunyai tugas mengamankan agenda Sidang istimewa MPR yang mempunyai agenda tunggal, yaitu tentang mencabut Tap MPR tentang Pemilu.

Rencana berlangsungnya Munaslub didukung oleh 23 DPD Golkar, sementara 4 DPD lain, Aceh, Bengkulu, Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara memilih abstain. Agenda dalam Munaslub sendiri, sesuai kewenangan diadakan perubahan AD/ART dan segala sesuatu yang menyangkut reformasi Golkar.

²⁴ Sumber AD/ART Golkar 1998-2004

²⁵Nanang Dwi Prasdi, *Op.Cit.*,hlm. 127.

Dibentuklah kepanitiaan Munaslub itu yang diserahkan kepada tim tujuh, yang beranggotakan dari Abdul Gafur, Bambang Trihatmodjo, Ary Mardjono, Waskito Reksosoedirjo, Aulia Rachman, Agung Laksono dan Moestahid Astari. Tim tujuh ini diberi satu minggu untuk menyusun kepanitiaan, baik pengarah maupun pelaksana, tetapi setelah tenggat waktu berlalu tim tujuh ini belum juga bisa menyusun siapa – siapa yang pantas duduk sebagai panitia penyelenggara Munas. Kegagalan tersebut karena ada tarik menarik perebutan tim kepanitiaan, akibatnya terpecahnya tim tujuh ini dalam dua kubu, yaitu kelompok Abdul Gafur dan Agung Laksono yang menginginkan agar panitia Munas terbentuk sebelumnya dikukuhkan.²⁶

Aura politik sangat kental sekali dalam pembahasan kepanitiaan dan agenda pertarungan di Munaslub pada tanggal yang telah ditetapkan. Kubu Harmoko yang diwakili Abdul Gafur dalam Tim Tujuh akhirnya mengklaim diri sebagai reformis dan secara terang – terangan mencalonkan Akbar Tandjung dalam Munaslub. Sedangkan kelompok Ary Mardjono dianggap sebagai kelompok pendukung status quo dan ingin mengembalikan kekuatan cendana.

Pada kesempatan itu B.J Habibie memberikan pengarahan, yaitu Golkar harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan; memperkuat kepercayaan diri para kader melalui iklim politik yang menimbulkan optimisme; mengamankan, memelihara dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang dimiliki Golkar untuk lima tahun ke depan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang; membentuk susunan kepengurusan baru yang mampu melaksanakannya. Pengarahan B.J Habibie ini dilakukan sebab melihat perseteruan di Golkar sudah sedemikian tajam. Apalagi turunnya tokoh-tokoh tua dari pihak ABRI sendiri seperti Edy sudrajat dan Try sutrisno menjadi kekhawatiran sendiri bagi dirinya.²⁷

Ada banyak faksi di Golkar, dalam pertarungan selanjutnya, kubu Edy sudrajat dan Sudharmono memiliki kesamaan kepentingan yaitu untuk

²⁶*Ibid.*, hlm. 139.

²⁷Dasman Djamaluddin, *Moratorium Politik : Menuju Rekonsiliasi Nasional*. (Jakarta ; Golkar Pres, 2003), hlm. 10 .

mengusur kelompok B.J Habibie, Akbar Tandjung dan Harmoko. Sedangkan kubu B.J Habibie dan Harmoko muncul nama – nama calon untuk diusung di Munaslub adalah Akbar Tandjung, Fahmi Idris, dan Agung Laksono. Tampilnya nama Akbar Tandjung bukan kali ini saja dan sebelumnya juga pernah disebut pada pembahasan Munas pada tahun 1993. Saat itu Akbar Tandjung dipasang untuk menandingi nama Soesilo Soedarman yang dimunculkan keluarga Besar TNI. Akbar Tandjung dinilai tokoh berbakat dari generasi muda yang dipandang juga mempunyai kapasitas untuk memimpin Golkar. Tampilnya Akbar Tandjung disokong sepenuhnya oleh B.J Habibie. Hal ini menunjukkan seriusnya pertarungan menjelang Munaslub berkaitan dengan pertarungan menjelang Sidang Istimewa MPR.

Munaslub pun sudah tiba tepat pada waktu yang telah ditentukan, *“Munaslub harus memilih pemimpin yang jujur dan mempunyai masa depan.”* Begitu bunyi pada sebuah spanduk kuning yang terbentang di salah satu ruas jalan kota Jakarta.²⁸ Pada pertarungan di Munaslub muncul nama kedua calon sesuai dengan permintaan kedua kubu yang masing – masing mempunyai nama calon sendiri untuk dijadikan sebagai kandidat ketua umum. Pada tahap ini kelompok non–Akbar Tandjung dan B.J Habibie yang diwakili oleh Edy Sudrajat, Sudharmono, Try Soetrisno, Indra Bambang Utoyo, Rachmat Witoelar, Sarwono Kusumaatmaja, Siswono Yudhohusodo, menyatu dalam satu kepentingan yaitu menjegal Akbar Tandjung yang di calonkan B.J Habibie dan Harmoko.

Dari sinilah kejelian Akbar Tandjung membaca situasi politik. Saat situasi menegangkan ketika acara hari kedua Munaslub. Dia (Akbar Tandjung) mengeluarkan pernyataan sejuak khas gaya politiknya yaitu, bila ia terpilih sebagai Ketua umum Golkar maka ia akan mundur sebagai menteri Mensesneg dan akan membawa Golkar ke paradigma baru sesuai dengan tuntutan politik saat ini. Itulah pertarungan Akbar Tandjung ke suara yang mendukungnya. Setelah pernyataan Wiranto selaku Menhankam/Pangab mengatakan pimpinan Golkar yang berasal dari kalangan Keluarga Besar ABRI (KBA) sebenarnya sudah sering kali menyatakan menarik diri dari konflik internal Golkar. Pernyataan inipun membuat

²⁸*Ibid.*, hlm. 11.

kubu Edy Sudrajat tersinggung, sehingga dari kalangan TNI aktif dan non aktif menyikapi polemik partai Golkar pasca Soeharto turun dan sesuai dengan keinginan suara masyarakat sipil, baik birokrasi Golkar maupun tidak.²⁹

Melihat peta dukungan ke Akbar Tandjung membesar, sejumlah mantan jenderal mengumpulkan 15 DPD yang dipimpin orang – orang Pepabri di hotel Wisata. Gerakan kubu Edy Sudrajat ini diimbangi kubu Akbar Tandjung dengan mendekati para Gubernur agar membujuk para ketua DPD di wilayahnya untuk mendukung Akbar Tandjung. Pendukung kubu Akbar Tandjung ini membawa isi pokok materi isi pemikiran – pemikiran Golkar kedepannya. Sedangkan Burhanudin Jusuf Habibie pun mengumpulkan tokoh-tokoh politik yang ada pada tiga jalur ABG untuk mengamankan pencalonan Akbar Tandjung, sebagai tanggapan pertemuan TNI aktif saat melakukan pendekatan – pendekatan khusus kepada Pepabri.

Dukungan suara tetap naik turun dan masing – masing kubu mengklaim telah mendapat dukungan 15 DPD. Suhu politik semakin panas dan mulai terasa saat menjelang detik – detik pemilihan. Pemilihan dilakukan dalam dua tahap, dimana tahap pertama untuk mendapatkan calon ketua umum dengan dukungan minimal lima suara DPD. Pada putaran pertama, Akbar Tandjung memperoleh 15 suara, Edy Sudrajat 11 suara, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, 1 suara. Hasil ini menunjukkan bahwa Akbar Tandjung dan Edy Sudrajat ditetapkan sebagai calon karena suara keduanya memenuhi persyaratan, yakni 5 suara DPD. Pada tahap pemilihan kedua, yaitu Akbar Tandjung terpilih dengan 17 suara, sementara Edy Sudrajat didukung oleh 10 suara.

Kemenangan Akbar ini lebih disebabkan oleh kecerdikan para pendukung Akbar Tandjung memanfaatkan situasi politik saat itu. Kubu Akbar Tandjung mencitrakan diri sebagai kubu reformis dan Edy Sudrajat terlanjur teropini sebagai loyalis Soeharto. Isu inilah yang berkembang dalam arena Munaslub. Terpilihnya Akbar Tandjung juga satu terobosan bagi usaha aktifis Golkar yang merangkak dari bawah, dan ia mempelopori kehadiran dan berkiprah di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 1973, Angkatan Muda Pembaharuan

²⁹M. Alfian Alfian, *Op.Cit* ,hlm. 43.

Indonesia (AMPI), sampai terpilih menjadi Ketua Umum Golkar. Melalui karier seperti itu, menunjukkan sosok Akbar Tandjung dianggap sebagai simbol kemenangan dari jalur G (Golkar) yang berasal dari politisi sipil di Golkar. Ia telah lama berkiprah di dalam Golkar, bisa dikatakan ia lahir dan besar di lingkungan Golkar.³⁰

2.3.2 Kemenangan Akbar Tandjung Sebagai Ketua Umum Golkar

Kemenangan Akbar Tandjung atas Edi Sudrajat menarik perhatian, yaitu dapat diketahui dalam sejarah Munaslub Golkar. Klaim dan realitas politik menunjukkan bahwa dukungan riil pemilihan ini dapat mengalahkan jaringan antar dua kubu, yaitu kubu loyalis Soeharto yang direpresentasikan Edy Sudrajat dan kubu loyalis Habibie yang direpresentasikan Akbar Tandjung. Edy Sudrajat selepas acara pemilihan, akhirnya menyatakan sikap moderat untuk mendukung calon yang memenangkan pertarungan.

Melalui strategi politik akomodasi Akbar Tandjung sendiri mengakui bahwa secara terbuka telah menelepon para Gubernur yang ternyata juga merangkap sebagai Ketua Dewan pertimbangan (Wantim) Golkar yang diperkirakan mau memberikan dukungan kepadanya, dan mereka adalah sebelas DPD yang telah mencalonkannya pada Akbar Tandjung. Melalui politik akomodasi itu Akbar Tandjung merangkul semua kelompok dalam Golkar yang heterogen, yaitu merangkul semua jajaran kepengurusan lama ketika Golkar dipimpin Wahono, Sudharmono, dan Harmoko.³¹ Berdasarkan realitas politik inilah Akbar Tandjung menghitung kekuatan suara saat menjelang Munaslub dan melakukan komunikasi politik. Padahal pengurus DPP lama jaman Harmoko hanya berjumlah 45 orang, jelas adalah jumlah yang fantastis.

Setelah proses pemilihan, Akbar Tandjung langsung menyampaikan keinginan para kader Golkar yang dibawa waktu Rapim. Konsep pun segera

³⁰ Kholid Novianto, DKK. *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi.* (Jakarta ; Sejati Pres. 2004.), hlm. 6

³¹ *Ibid.*, hlm. 20.

dilontarkan Akbar Tandjung ketika menyampaikan visi – misinya sebagai kandidat Ketua Umum dalam Munaslub tersebut. Akbar Tandjung membawa gagasan adanya paradigma baru yang mengharapkan Golkar dibangun dengan nilai – nilai selaras dengan tuntutan reformasi, dan menjadikannya sebagai partai politik yang terbuka (inklusif, mandiri, independen, demokratis, dan moderat).³²

2.4 Metamorfosis Golkar :Perubahan kestruktural Partai Golkar

Pasca Munaslub kemenangan Akbar Tandjung sebagai ketua umum Golkar di masa transisi politik, membuat ia melakukan kebijakan baru dengan struktur yang baru pula sesuai dengan tantangan zaman masa itu. Ternyata, kondisi yang dihadapi Golkar dibawah Ketua Umum Akbar Tandjung tidaklah mudah. Kekhawatiran bahwa Golkar kehilangan banyak pendukung di era multipartai yang mewarnai dinamika politik partai tersebut. Oleh sebab itu “instropeksi” dan “koreksi diri” bagi Golkar sebagai orsospol yang semestinya bisa mandiri, dan menghilangkan bentuk-bentuk praktik politik lama yang menyimpang. Kemenangan Akbar Tandjung ini disambut hangat oleh pengurus Golkar di daerah-daerah dan mereka berharap, Golkar akan lebih mencerminkan suasana organisasi politik modern yang demokratis.

Beberapa jam setelah terpilih, Akbar Tandjung langsung menyusun kepengurusan dibantu dengan beberapa anggota tim formatur. Langkah pertama Akbar Tandjung dalam menyusun kepengurusannya yaitu berkoordinasi dengan Edy Sudrajat. Tujuannya hanya satu, merangkul orang-orang dari kubu Edy Sudrajat yang dianggap pantas duduk dalam struktur kepengurusan, bahkan Edy Sudrajat langsung ditawarkan sebagai Dewan Penasehat, namun ia menyatakan menolak. Edy Sudrajat hanya mempersilahkan jika sejumlah pendukung-pendukungnya ditarik untuk masuk ke DPP Golkar. Beberapa kader muda pendukung Edy Sudrajat seperti Indra Bambang Utoyo, Asep Sudjana, Erie

³²Wawancara dengan Musfihin Dahlan, Mantan kader Golkar bidang Litbang Kaderisasi 1998, pada tanggal 19 Agustus 2014. di Akbar Tandjung Institut

Sukardja, Edwin Kawilarang, Budi Haryanto dan Tubagus Haryono dimasukkan ke dalam DPP Golkar.

Akbar Tandjung telah mengakomodasi beberapa kader Golkar baik dari kubu pendukungnyamaupun dari pihak yang kalah. Hal tersebut dilakukan Akbar Tandjung sebagai usaha untuk melakukan konsolidasi politik untuk membesarkan di Golkar pasca Munaslub. Selain itu keputusan penghapusan Dewan Pembina yaitu figur Ketua Dewan Pembina seperti Soeharto misalnya, bukanlah suatu keputusan yang mudah bagi Akbar Tandjung. Akbar Tandjung menyadari kuatnya posisi Dewan Pembina oleh para pengurus Golkar dengan opsi membubarkan Dewan Pembina dalam arena Munaslub. Berdasarkan pasal 18 Anggaran Dasar Golkar yang baru dewan pembina dihapus, dan yang ada hanya Dewan Penasehat.³³

Menurut mantan pengurus Golkar periode 1998-2003 seperti Ibrahim Ambong, Musfihin Dahlan, Mahadi Sinambela, “ketika Akbar Tandjung terpilih menjadi Ketua Umum Golkar yang baru, kebijakan Akbar yang paling berani adalah dia langsung menghapus sistem *top down*³⁴ dari atas ke bawah yaitu menghapus Dewan Pembina Golkar (Soeharto), dan menghapus jalur A (ABRI) , dan B (Birokrasi / PNS). Perombakan yang dilakukan Akbar Tandjung ketika itu sesuai dengan tuntutan reformasi, maka dia merubah perombakan Golkar dari *buttom up*³⁵ yaitu dari bawah ke atas. Pengurus DPD yang mewakili daerah masing – masing dipanggil bersama untuk mengambil keputusan secara bersama – sama pula sesuai musyawarah mufakat”.³⁶

³³ *Ibid.* Wawancara dengan Musfihin Dahlan

³⁴ model pelaksanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya pelaksana saja.

³⁵ model pelaksanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan untuk menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan, dan atasan berfungsi sebagai fasilitator.

³⁶ Wawancara dengan Mahadi Sinambela, Mantan Sekjend Golkar 1998, pada tanggal 18 Agustus 2014 di Akbar Tandjung Institut

Langkah berani Akbar Tandjung ini tidak hanya pada pertarungan perubahan struktural, akan tetapi juga ia juga berani mengambil keputusan mengenai anggaran dana untuk mempersiapkan kontestasi pemilu 1999 sesuai dengan tuntutan reformasi melalui kebijakan Sidang Istimewa MPR 1998.³⁷ Anggaran yang dipersoalkan setelah posisi Soeharto dihapus menjadi Dewan Pembina, dan begitu pula jalur ABRI dan birokrasi yang biasa mendapat pemasukan dari kedua instansi – instansi tersebut, dan dari beberapa BUMN terutama Pertamina menjadi sumber pendanaan utama bagi Golkar. Muncul banyak inisiatif untuk mengoptimalkan pemasukan keuangan sebagai sumber pendanaan baik dari simpatisan, kader Golkar di beberapa daerah, juga membuka rekening bagi para donatur maupun sukarelawan yang ingin membantu keuangan partai Golkar.³⁸

Menurut beberapa tokoh Golkar seperti, Ibrahim Ambong,³⁹ Mahadi Sinambela,⁴⁰ Musfihin Dahlan,⁴¹ Hajriyanto M.Thohari,⁴² agar citra partai Golkar lepas dari bayang-bayang Orde Baru, Akbar Tandjung tahu betul dari beberapa masyarakat masih ada yang mengharapkan Golkar bangkit, maka dari itu yang dilakukannya adalah segera melakukan pembaharuan Golkar yang independen

³⁷ Wawancara dengan Musfihin dahlan pada tanggal 20 Agustus 2014 di kantor Akbar Tandjung Institut.

³⁸ Wawancara dengan Ibrahim Ambong, Mantan Sekjend Golkar tahun 1998.pada tanggal 21 Agustus 2014 di DPP Golkar, Slipi. Jakarta Barat.

³⁹ Ibrahim Ambong, Mantan Sekjend Golkar tahun 1998.pada tanggal 21 Agustus 2014 di DPP Golkar, Slipi. Jakarta Barat.

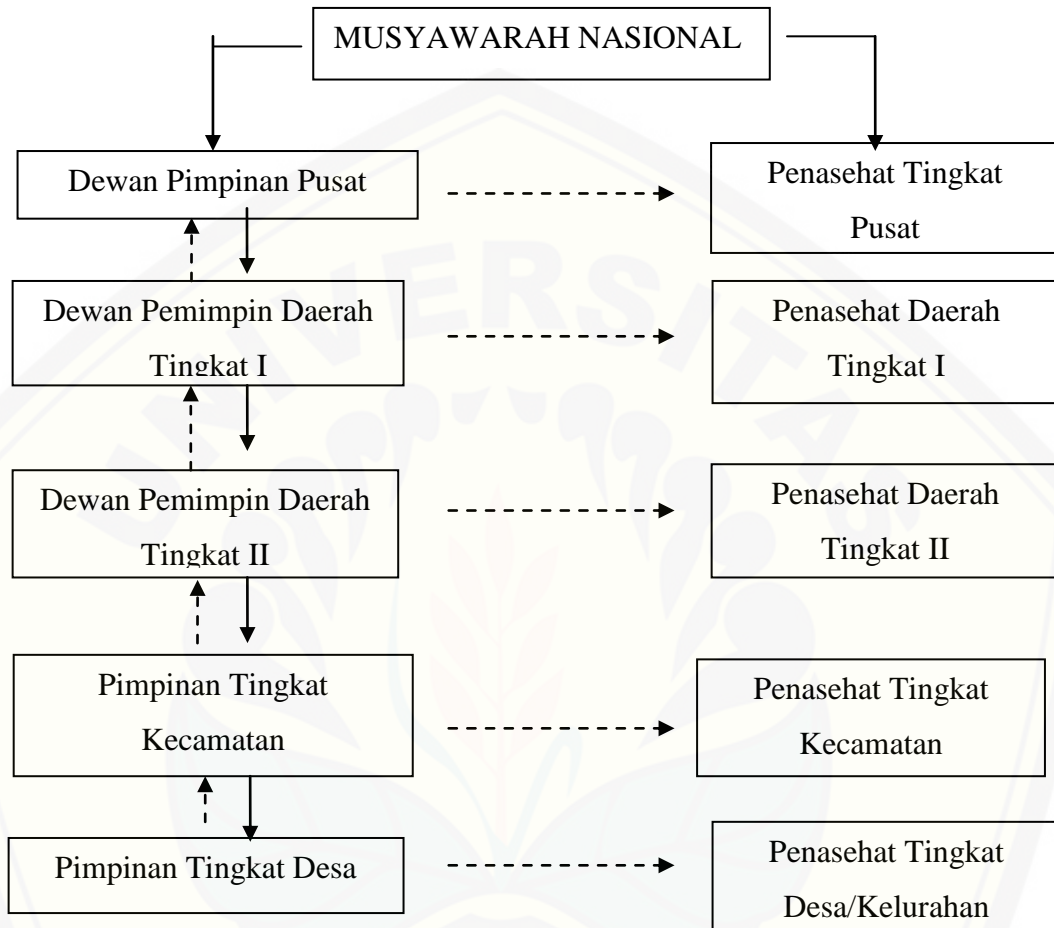
⁴⁰ Mahadi Sinambela, Mantan Sekjend Golkar 1998 pada tanggal 18 Agustus 2014.

⁴¹ Musfihin Dahlan pada tanggal 20 Agustus 2014 di kantor Akbar Tandjung Institut.

⁴² Hajriyanto M. Thohari, Wakil MPR periode 2009-2014, merupakan tim penggagas yang menyusun paradigma baru Golkar, wawancara pada tanggal 23 Agustus 2014 di gedung Nusantara DPR/MPR.

atau Golkar baru yang sekaligus membawa paradigma baru Golkar sebagai pencitraan kembali Golkar. Berikut struktur organisasi Golkar baru:

Bagan 1. Struktur Partai Golkar Pasca Munaslub 1998



Keterangan:

—————> = Intruksional

- - - - -> = Koordinatif dan konsultatif

Sumber: AD / ART Golkar 1998 - 2003

Sementara itu perubahan secara mendasar atas pola pengambilan keputusan Partai Golkar juga menuntut adanya perubahan pola kepemimpinan yaitu pemimpin harus bersifat demokratis dalam setiap mengambil keputusan, tidak lagi dengan cara otoriter. Pada konteks ini, proses pengambilan keputusan partai senantiasa dilakukan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang bersifat objektif, aspiratif, dan transparan. Selain itu harapan pengurus Golkar di daerah yang menginginkan Golkar baru mencerminkan suasana organisasi politik modern yang demokratis dan mandiri.

2.4.1 Perumusan RUU Politik 1999

Percepatan Pemilu yang diinginkan masyarakat adalah jawaban atas krisis politik sejak kejatuhan Soeharto 21 Mei 1998 dan peralihan kekuasaan kepada Habibie yang menimbulkan pro dan kontra atas legitimasi kekuasaan. Penyelenggaraan Pemilu yang akan datang diharapkan jauh lebih baik dengan Pemilu sebelumnya, dan sistem Pemilu adalah Multipartai. Melalui sistem Pemilu yang demokrasi, memungkinkan sejumlah calon anggota DPR berjuang untuk menduduki kursi DPR secara kompetitif.

Terpilihnya Akbar Tandjung sebagai Ketua umum Golkar pada Munaslub 1998, diharapkan membawa Golkar keluar dari krisis politik, dan legitimasi. Keputusan yang dilakukan Akbar Tandjung menghapus Dewan Pembina, Soeharto, dan pemutusan Jalur ABRI, merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan yang ikut mendukung kaum reformis yaitu perubahan RUU politik, Golkar menjadi Partai.

Pada Sidang Istimewa MPR membahas tentang kontroversi ABRI dan netralitas PNS, yang seharusnya tidak terikat di dalam organisasi sosial politik (Orsospol). Satu-satunya yang harus dilakukan oleh pemerintahan B.J Habibie adalah menyiapkan perangkatnya, yaitu membentuk satu komite untuk merevisi undang-undang politik yang ada. Maka dengan segera B.J Habibie mengutus Mendagri Syarwan Hamid untuk secepatnya membentuk satu komite yang umum dikenal dengan Tim Tujuh. Tim Tujuh ini dipimpin oleh Ryas Raasyid, dan

anggotanya antara lain adalah Ranmlan Subakti, Andi Mallarangeng, Afan Gaffar, Djohermansyah Djohan, Luthfi Mutty, dan Anas Urbaningrum.

Tugas Tim Tujuh ini adalah pertama, mengatur undang-undang partai politik. Undang-undang ini mencakup banyak tema, seperti syarat untuk membentuk partai, ideologi partai, fungsi partai, keanggotaan, keuangan partai, dan berbagai sanksi hukum terhadap partai politik. Kedua, adalah undang-undang tentang Pemilu atau undang-undang yang mengatur proses pemilihan anggota DPR dan DPRD. Undang-undang Pemilu ini mencangkup beberapa rumusan tentang ukuran dan besarnya distrik, pembentukan badan independen yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemilu, syarat kelayakan pemilih, syarat caleg, mekanisme pemantauan. Hukuman bagi penyelenggara Pemilu. Ketiga, adalah undang-undang yang mengatur struktur dan fungsi MPR, DPR, dan DPRD. Undang-undang ini juga melingkupi banyak rumusan, mulai dari jumlah anggota MPR dan DPR, kelayakan, fungsi, jenis-jenis komisi, dan struktur kepemimpinan. Selain Tim Tujuh di legislatif pun membentuk panitia khusus (Pansus) yang juga membahas RUU politik.⁴³ Pansus ini diketuai oleh Abu Hasan Sazili dari Fraksi Kekaryaan Pembangunan (F-KP). Materi yang diajukan berupa tiga materi, dan dibagi menjadi tiga panitia kerja (Panja). Tiga materi tersebut berupa RUU Pemilu, RUU Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan RUU susunan dan Kedudukan anggota DPR / MPR.⁴⁴

Pembahasan RUU Politik ini sepanjang November hingga akhir tahun 1998 mendapat sorotan dari masyarakat, terutama menyangkut posisi politik ABRI di DPR dan netralitas posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Materi lain yang sangat krusial adalah syarat pendirian partai politik yang harus dibuktikan dengan sejuta tanda tangan dukungan dan foto kopi KTP sebagaimana diatur dalam RUU tentang partai politik. Selanjutnya penentuan dan pemetaan distrik Pemilu, keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengganti Lembaga

⁴³ Dhurorudin Mashad. *Menggugat Penguasa : Ngarso Ngumbar Angkoro*. (Jakarta; Gelora Aksara Pratama. 1999.) ,hlm. 32.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

Pemilihan Umum (LPU) dan kedudukan lembaga Pengawas Pemilu (Panwaslak atau sekarang disingkat dengan Panwaslu) sebagaimana diatur dalam RUU Pemilu.⁴⁵

Rancangan Tim Tujuh pada awalnya ditujukan untuk mengeluarkan TNI dan dari DPR. Hal ini menyangkut sesuai dengan tuntutan publik yang mendorong dihapusnya kursi militer di lembaga legislatif itu, kehadiran militer di DPR dilihat publik sebagai ketidakadilan karena partai politik harus bekerja keras untuk meraih setiap kursi. Sedangkan militer mendapatkan kursi begitu saja.⁴⁶ Hal inilah menyangkut stigma Golkar setiap Pemilu pada masa Orde Baru pemilih wajib memilih Golkar, dan TNI diberi kompensasi berupa “kursi gratis” di DPR ataupun MPR.⁴⁷ Akan tetapi B.J Habibie dan militer meminta bahwa militer sebagai kekuatan politik harus tetap diakomodasi, begitupun dengan netralitas PNS. Menurutnya, apalah arti jumlah PNS dibanding jumlah keluarga di Indonesia. Pernyataan B.J Habibie ini membuat semakin tambah rumit mempertahankan citra Golkar dan juga kepada pendukung Akbar Tandjung, meskipun ia ikut mendukung suaranya ketika Munaslub.⁴⁸

Melihat manuver Habibie tersebut sebagian kalangan menjadi bertanya – tanya, mengapa ia berbeda pendapat dengan partainya sendiri dan tidak mendukung Golkar?. Sebagian pendapat mengatakan, inilah langkah populis B.J Habibie, seolah – olah manuver ini adalah kompensasi atas isu arus politik di tengah riuh rendahnya hujatan dan demonstrasi saat itu, yang menginginkan agar PNS dan ABRI netral dalam Pemilu. Selanjutnya dibalik itu, ada keyakinan telah

⁴⁵ Sidharta Gautama dan Aries Boedimo. *Moralitas Politik dan Pemerintahan Yang Bersih, Menurut Amin Rais, Yusril Ihza Mahendra, Emil Salim, Nurcholish Madjid.* (Jakarta; Grafindo Persada. 1999), hlm. 56.

⁴⁶ Dalam UU No.2/1985 tentang struktur dan kedudukan DPR/MPR, salah satu pasal menyebutkan bahwa DPR menyediakan 100 kursi bagi militer dan utusan golongan yang diangkat.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

⁴⁸ Dhurorudin Mashad, *Op.cit.*, hlm. 80.

direncanakan oleh para operator dan mesin politik B.J Habibie sehingga Golkar sudah mengkalkulasikan langkah – langkah berikutnya.

Pembahasan tentang pengurangan jumlah kursi militer dan netralitas PNS yang melarang untuk menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam kegiatan partai, perdebatan kedua pembahasan ini dibahas sangat intens di pemerintahan. Hasil akhirnya adalah pengurangan jumlah kursi militer menjadi 37 dari jumlah anggota DPR yang baru ditawarkan, yaitu 500 kursi, sebelumnya adalah 55 dari 550 kursi di DPR. Pembahasan ini juga menambahkan bahwa militer akan keluar dari DPR dan MPR setelah 2004. Ketetapan ini sangat didukung oleh PPP dan PDI, namun ditentang Golkar. Tim Tujuh menawarkan peraturan ini sebagai usaha untuk menciptakan medan permainan yang setara dengan mencegah Golkar memanfaatkan birokrasi untuk mendapatkan dukungan suara. Sebagaimana telah disebutkan, Golkar mendapatkan banyak keuntungan dari undang-undang Pemilu 1985, yang mengharuskan pegawai negeri memilih Golkar. karena peraturan ini telah dirubah, menyatakan pegawai negeri dilarang menjadi fungsionaris Golkar. Tentu saja Golkar sangat menentang aturan ini, kemudian diketahui Ketua Golkar Akbar Tandjung selaku menjadi Sekretaris Negara, menunda rancangan itu diserahkan ke DPR.⁴⁹ Baru setelah dipaksa menerima rancangan itu, Akbar Tandjung mengirimkannya ke DPR.

Paket undang-undang yang baru ini, merupakan usaha dari fraksi – fraksi lain yang ikut merancang RUU politik ini, khususnya mengenai sistem Pemilu mendatang. Golkar menginginkan Pemilu dijalankan dengan sistem distrik.⁵⁰ Pendapat Golkar ini ditentang oleh Fraksi PPP dimana pada waktu itu Hamzah Haz sebagai ketua fraksi yang bersikukuh dengan sistem proporsional dengan daerah tingkat I dengan pertimbangan sisa suara tidak hangus terbuang percuma

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 87.

⁵⁰Sistem Distrik adalah daerah pemilihan berbasis pada jumlah penduduk, dan setiap daerah ada hanya satu wakil terpilih. sistem distrik calon legislatif dikenal oleh pemilih, dan banyak suara yang hilang sia-sia sehingga pemilih pun kian malas untuk memilih partai yang sudah pasti akan kalah. Dengan sistem penghitungan suara seperti ini maka akan menghasilkan dua partai bersaing.

jika penghitungan suara ditarik pada tingkatan tersebut, sebab masih ada sisa 70% yang bisa diperhitungkan dan digabungkan untuk mendapatkan satu kursi. Permainan statemen politik dari kubu Golkar juga menunjukkan kekhawatiran FPP dan juga fraksi – fraksi yang lain jika pengambilan keputusan RUU politik akan dilakukan dengan cara voting. Maka dari itu Golkar akan menang dan ini akan sangat berpengaruh pada perolehan suara Golkar mendatang, karena diparlemen partai tersebut sangat dominan. Melihat dominasi politik Golkar tersebut, fraksi lainnya meminta keputusan dari tim kepantiaan dan juga B.J Habibie selaku pimpinan eksekutif.⁵¹

Adanya perdebatan yang cukup alot mengenai pembahasan RUU politik ini di pemerintahan, yang dengan segera oleh fraksi-fraksi di DPR harus mengambil keputusan. Sementara Akbar Tandjung menentang B.J Habibie dan Syarwan Hamid selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyetujui aturan tersebut. Pada salah satu sesi persidanga legislatif, Golkar bahkan mengancam dengan meminta rancangan itu disetujui melalui mekanisme pemungutan suara, karena Golkar memegang mayoritas suara di DPR. Khawatir Golkar memenangi sebagian besar suara. Mengenai masalah tersebut akhirnya Golkar berhadapan dengan FPP, F-PDI dan pemerintah. Akhirnya kesepakatan dicapai oleh kekuatan–kekuatan yang bertentangan dengan Golkar di DPR. Hasilnya menysihkan ketetapan itu dan menyetujui persoalan tentang netralitas pegawai negeri tersebut ditangani terpisah melalui peraturan pemerintah. Mengenai pernyataan dari fraksi Golkar yang mengatakan “ kapan pun jika PNS tidak masuk Parpol”.⁵² Menanggapi hal ini maka fraksi lainnya menyetujui tentang netralitas PNS, dan keluarlah Peraturan Presiden (PP) No. 5 tahun 1999 menyatakan, pegawai negeri yang bergabung dengan partai politik dibebaskan dari kewajiban tugas mereka sebagai Pegawai Negeri. Akan tetapi gaji mereka diberhentikan sementara. Mereka dapat aktif kembali status mereka sebagai pegawai negeri dalam satu tahun setelah menyatakan bahwa mereka tidak lagi ikut partai politik.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 89.

⁵²*Ibid.*, hlm. 90.

Adanya peraturan pemerintah ini Golkar telah kehilangan semua yang dimiliki pada masa Orde Baru. Paket Undang – undang ini selesai pada awal Januari 1999 yang terdiri dari UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Sementara undang – undang tentang partai politik menegaskan antara lain “ kebebasan membentuk partai dan tidak dibenarkannya Pegawai Negri Sipil (PNS) merangkap sebagai anggota suatu partai politik. Undang – undang tentang Pemilu membuka kebebasan seluas – luasnya kepada partai politik yang mengikutinya dengan syarat yang masih demokratis dan rasional. Mengenai pembagian kursi masih tetap mengacu pada sistem proposional di Daerah Tingkat I yang juga adalah daerah pemilihan. Undang – undang susunan dan kedudukan anggota DPR / MPR RI, antara lain menegaskan bahwa jumlah anggota DPR 500 orang dan pengurangan jumlah anggota TNI/Polri yang diangkat menjadi 38 orang atau berkurang 37 orang sebelumnya. Anggota MPR dikurangi dari 1000 menjadi 700 orang, dengan rincian 500 anggota DPR, 135 utusan daerah (5 orang per propinsi) dan utusan Golongan – Golongan sebanyak 65 orang”.⁵³

Terpuruknya Golkar dalam RUU politik ini masih menyisakan beberapa keuntungan sendiri seperti 37 kursi ABRI. Dampak dari Undang – Undang partai politik ini membuat internal Golkar pecah, misalnya keluar dari Golkar dan membuat partai politik baru. Perubahan RUU ini yang salah satunya menggunakan sistem metode suara terbanyak didukung oleh Golkar dan ditolak oleh PDI dan PPP, karena selama masa kekuasaan Orde Baru banyak pejabat Golkar dikenal luas oleh publik. Sistem metode suara terbanyak ini, seperti sering dikemukakan akan mendorong munculnya dua partai besar atau sistem dua partai. Daripada bersandar pada sistem metode suara terbanyak, Tim Tujuh mengajukan syarat lain, yaitu dalam mendirikan partai politik, satu partai harus memiliki jumlah minimal cabang yang tersebar di beberapa provinsi dan kabupaten. Tujuannya, adalah untuk menciptakan sistem kepartaian pluralisme dimana akan ada lebih

⁵³ Komisi Pemilihan Umum, *Pemilu Indonesia dalam angka dan Fakta*. (Jakarta;1999. Biro Humas KPU Jember)

kepartaian. Gagasan tersebut yang oleh Tim Tujuh menciptakan sistem kepartaian sesuai keinginan publik yakni multipartai. Hal ini kemudian memecah partai lama dan membentuk partai baru yang akhirnya terjadi dalam kubu yang berlawanan.

Melihat pertarungan yang juga telah disiapkan oleh elite politik tertentu untuk memenangi kontestasi rakyat, Presiden B.J Habibie telah mempersiapkan kelompok elitnya yang bernafaskan Islam, sebut saja Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Organisasi keislaman ini yang didirikan pada masa Orde Baru, sebenarnya bertujuan untuk agar cendekiawan muslim dapat dikendalikan oleh Soeharto dan untuk kepentingan politik Soeharto dan kroninya. Organisasi keislaman ini yang didalamnya terdapat NU, Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya, akan tetapi mereka oleh Soeharto menyuruh Ormas Islam lainnya untuk memilih Golkar. Beberapa partai yang ketuanya berasal dari ICMI siap untuk menampung 70% lebih pemilih yang tidak mau ikut mengintimidasi Golkar.⁵⁴ Terhitung 12 partai siap menampung orang yang keluar dari Golkar, diantaranya Partai Daulat Rakyat, Partai Keadilan, Partai Republik, Partai Kebangkitan Umat, dan lain – lain.

2.4.2 Tantangan Golkar Setelah Reformasi

Resistensi politik terhadap Partai Golkar pasca reformasi telah membuat sikap politik berbagai *onderbouwnya*, dua organisasi pendukung Partai Golkar yaitu MKGR dan Kosgoro mengalami perpecahan. Hal ini disebabkan adanya konflik disetiap masing-masing partai yang lahir di Orde Baru, dan pada akhirnya ikut menyikapi perubahan politik. MKGR di bawah Ny. Mien Sugandhi menyatakan sikapnya keluar dari Partai Golkar dan ingin menjadikan MKGR menjadi partai politik. Sementara itu hal yang sama terjadi, sebagian pengurus Kosgoro pun mendukung Edy Sudrajat mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Di MKGR pun masih terjadi perpecahan, terdapat dua kubu untuk menyikapi MKGR tetap mendukung Partai Golkar dan kubu kedua menjadikan MKGR sebagai partai politik. Kubu yang tetap mendukung MKGR sebagai

⁵⁴ Dhurorudin Mashad, *Op.cit.*, hlm. 23.

Ormas Partai Golkar dipimpin oleh Irsyad Sudiro. Keputusan Ny. Mien Sugandhi menjadikan MKGR sebagai partai politik menuai reaksi dari komponen MKGR lainnya, sehingga kemudian membentuk komite penyelamat MKGR yang bertugas melakukan musyawarah besar luar biasa (Mubeslub). Mubeslub MKGR diselenggarakan pada 6-7 Mei 1999, dan menetapkan Irsyad Sudiro sebagai ketua umumnya.

Sejak berdirinya MKGR 3 Januari 1960, Ny. Mien Sugandhi mengklaim bahwa MKGR merupakan warisan Sugandhi yang tidak pernah diwariskan ke Irsyad Sudiro, akan tetapi demikian pihak Ormas MKGR menolak jika MKGR disebut sebagai organisasi warisan atau perseroan dimana pemegang saham mayoritas berhak terlibat didalamnya. Sejak berdirinya sampai tahun 1991, MKGR dipimpin oleh Sugandhi, Ny. Mien Sugandhi terpilih sebagai Ketua Umum MKGR masa bhakti 1994-1999. Pada 24 September 1998, Mien Sugandhi mendeklarasikan Partai MKGR, dipihak lain kubu Ormas MKGR yang dipimpin oleh Irsyad Sudiro menegaskan bahwa tetap mendukung Partai Golkar. Meskipun demikian perpecahan ditubuh MKGR ternyata tidak mengurangi dukungan organisasi ini pada Partai Golkar, terbukti pada Pemilu 1999 Partai MKGR tidak memperoleh cukup dukungan suara.

Hal yang sama dialami oleh Ormas Partai Golkar, Kosgoro. Pasca Munaslub Golkar 1998, Kosgoro melakukan musyawarah pimpinan nasional (Muspimnas) pada bulan Juni 1998 yang menghasilkan rekomendasi politik. Hasil rekomendasi itu Kosgoro mengkaji ulang posisi politiknya, karena dalam rangka menyikapi iklim politik baru atau pergantian UU politik, yang semula merupakan organisasi pendukung Golkar menjadi organisasi yang independen. Keputusan tersebut, seluruh anggota Kosgoro mempunyai kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada partai politik manapun. Meskipun demikian sikap Partai Golkar menghargai hasil keputusan Muspimnas Kosgoro.

Tantangan lain kepemimpinan Akbar Tandjung yang sangat krusial saat itu, berdirinya Partai PKP tidak lepas dari kepuasan kubu Edy Sudrajat atas hasil Munaslub Golkar 1998. Kubu Edy Sudrajat menganggap Golkar yang dipimpin oleh Akbar Tandjung kurang aspiratif dan kurang reformis. Beberapa tokoh yang

terlibat dalam pembentukan PKP adalah Hayono Isman, Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, dan David Napitulu. Menurutnya, Golkar tidak konsisten dalam mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 karena bersedia mencabut Tap No.IV/MPR/1983 tentang referendum yang berfungsi mengamankan dasar negara tersebut. Sama halnya dengan MKGR, partai ini tidak memperoleh dukungan secara signifikan pada pemilu 1999.

Ditengah kontroversi tentang perlu cuti atau bahkan mundur bagi seorang menteri jika ingin terjun berkampanye bagi partai politiknya, Adi Sasono sebagai menteri Koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah, yang juga andalan Partai Golkar menolak untuk berkampanye bagi Partai tersebut. Sikap Adi Sasono mengundang pertanyaan, padahal ia adalah salah satu ketua DPP yang wajib untuk mensosialisasikan program kemenangan Partai Golkar pada saat Pemilu. Ternyata Adi Sasono membuat Partai sendiri dengan nama Partai Daulat Rakyat yang dideklarasikan pada pada sabtu 17 April 1999. Kebijakan politik Adi Sasono dengan manuvernya membuat partai politik sendiri yaitu Partai Daulat Rakyat (PDR), kemungkinan untuk sorotan Pemilu 1999 ditengah banyak kalangan tentang program kerakyatannya. Figurnya sebagai Menteri KPKM (Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah) begitu strategis, ia merekrut beberapa aktivis LSM sebagai pendukung inti, karena ia terlebih dahulu berada dibelakang layar sebelum mendirikan PDR yaitu mendirikan Daulat Rakyat Grup dan mendirikan tabloid Daulat Rakyat dengan program ekonomi kerakyatannya.⁵⁵

Keberadaan partai politik baru tersebut, tidak lepas dari peran tokoh – tokoh yang pernah terlibat aktif di dalam Golkar di masa Orde Baru. Golkar yang sekarang menjadi partai yang dideklarasikan kembali pada 7 Maret 1999, adalah sebuah partai yang mengedepankan perubahan. Oleh sebab itu, pasca Munaslub 1998 partai Golkar dihadapkan pada pergeseran dukungan politik yang signifikan ditingkat organisasi, dan menghadapi realitas persaingan politik baru dimana beberapa tokoh mendirikan partai politik baru dan hijrah ke kepartai politik

⁵⁵”. Republika, Disayangkan Pengunduran Diri Pengurus Golkar, 18 April 1999.

lain.⁵⁶ Kenyataan tersebut membuat jajaran pengurus partai Golkar pasca Munaslub harus bekerja keras untuk mempertahankan eksistensi Partai Golkar dengan berkenaan Pemilu semakin dekat.



⁵⁶Nanang Dwi Prasdi, *Op.cit.*, hlm. 239.

Bab IV

Kesimpulan

Dalam penelitian ini diketahui bahwa Pemilu selama ini berkaitan dengan keterlibatan militer yang memang telah dimanfaatkan oleh rezim Soeharto untuk kepentingan politiknya. Soeharto mempergunakan Partai Golkar dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dibentuknya sendiri sebagai kekuatan politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Rekayasa Pemilu yang dijelaskan pada tulisan ini adalah untuk mempertahankan kekuasaannya selama 6 kali Pemilu. Pada akhirnya kekuasaan kembali pada rakyat, setelah kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998 dan beralih ke pemerintahan B.J Habibie. Era multipartaipun mulai didengungkan dan diaktualisasikan sesuai tuntutan publik melalui berdirinya partai-partai politik. Peralihan kekuasaan kepada B.J Habibie menimbulkan pro dan kontra atas legitimasi tersebut, karena ia merupakan orang kepercayaan Soeharto. Akan tetapi hal itu dapat ditutupi dengan keberhasilan B.J Habibie

selama pemerintahannya menyelenggarakan Pemilu 1999 beserta perubahan paket kebijakan undang-undang politik yang baru.

Paket kebijakan undang-undang dibidang politik ini merupakan koreksi dari Pemilu sebelumnya selama Orde Baru. Paket undang-undang ini yaitu terdiri dari UU No.2 tahun 1999 tentang partai politik, UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU No.4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, dan DPRD. Sementara undang-undang partai politik menegaskan antara lain, “kebebasan membentuk partai politik dan tidak diikutkannya pegawai negeri sipil (PNS) merangkap sebagai anggota suatu partai politik. Mengenai pembagian kursi masih tetap dengan system proporsional. Undang-undang tentang kedudukan di DPR/MPR RI, menegaskan bahwa jumlah anggota DPR 500 orang dan pengurangan jumlah anggota TNI/Polri yang diangkat menjadi 37 orang, sedangkan anggota MPR dikurangi dari 1000 menjadi 700 orang dengan rincian 500 anggota DPR, 135 utusan daerah (5 orang perprovinsi) dan utusan golongan-golongan sebanyak 65 orang.

Dari perubahan paket kebijakan undang-undang politik yang baru untuk persiapan Pemilu 1999, salah satu pasal yang harus diterima Partai Golkar adalah mengenai kenetralan pegawai negeri sipil (PNS). Birokrasi ini tidak lagi menjadi bagian dari organisasi politik Partai Golkar, dimana setiap Pemilu selama Orde Baru pegawai negeri sipil wajib memilih Golkar. Golkar yang pada rezim Orde Baru enggan dikatakan sebagai partai politik, tetapi dikenal sebagai organisasi sosial politik (Orsospol) yang membawahi segala bidang organisasi massa berbagai profesi secara nasional. Pasca reformasi Partai Golkar merupakan partai satu-satunya yang mengalami berbagai diskriminasi, intimidasi, bahkan hujatan dari masyarakat Indonesia. Sikap tersebut dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan pendukung reformasi atau orang-orang yang membenci rezim Orde Baru, terutama oleh lawan-lawan politiknya. Selanjutnya, hal yang tidak terduga setelah pada pelaksanaan Pemilu 1999 bahwa partai Golkar berhasil memperoleh posisi kedua. Meskipun dukungan suara tidak sebesar pada Pemilu 1997, prediksi ini berlawanan oleh lawan politiknya dan para pengamat politik yang memperkirakan Golkar akan mati.

Harus diakui bahwa pada waktu rezim Orde Baru Partai Golkar masih memiliki kekuatan yang tersentralisasi dan diorganisasi secara baik, terutama penyangga utamanya yaitu ABRI, dan Birokrasi. Lepasnya kedua pilar ini membuat Partai Golkar harus *survive* dalam mempertahankan partainya. Partai Golkar diketuai oleh Akbar Tandjung hasil dari Munaslub 1998, memiliki pengalaman politik yang cukup meyakinkan dengan didukung kualitas kadernya dan kemampuan manuver politik yang cukup tinggi. Ini suatu realita yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh partai manapun yang hanya mengandalkan hubungan emosional belaka. Mengingat karir politik Akbar Tandjung, ia pernah menjadi ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ketokohan Akbar Tandjung sebagai alumni dari organisasi ekstra mahasiswa terbesar yang telah mengakar kuat dari cabang-cabang setiap daerah di seluruh Indonesia, maka lebih banyak alumni HMI yang bergabung dengan Golkar dan sekaligus menjadi kendaraan politiknya. Selain Akbar Tandjung menggunakan HMI sebagai kendaraan politiknya, ia juga mengandalkan kelompok pengusaha atau korporat dalam kemenangan Pemilu 1999, sebut saja HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) karena banyak anggota Partai Golkar yang berpengaruh adalah pengusaha.

Berbagai strategi lainnya yang dilakukan Akbar Tandjung adalah dengan “money polityc”nya, yaitu dengan mengunjungi pesantren-pesantren yang berbasis NU, dimana seyogyanya pesantren itu seharusnya menjadi basis PKB dan mendukung PKB. “Money polityc” itu diberikan dengan alasan untuk merenovasi pondok pesantren, atau membangun masjid. Pesantren yang oleh Partai Golkar dianggap “cukup memegang kyainya saja”, maka santri-santri di pondok pesantren tersebut akan memilih Partai Golkar. Hal yang sama dilakukan Akbar Tandjung mengunjungi di luar Pulau Jawa adalah bertemu dengan kepala adat setempat. Usaha lainnya yang dilakukan Akbar Tandjung untuk pencitraan kembali Partai Golkar agar pro dengan demokrasi, yaitu dengan bekerja sama dengan media massa terutama media cetak. Media cetak ini seperti surat kabar dan majalah mengemas rapi setiap kampanye beserta program-program kerja Partai

Golkar, dan pendapat-pendapatnya mengenai perubahan politik yang terjadi di Indonesia.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat masih memilih Partai Golkar; *Pertama*, sudah terbiasa selama 32 tahun memilih Golkar, karena setiap organisasi onderbownya mewakili segala bidang profesi yang ada di Indonesia. *Kedua*, dukungan sumber daya finansialnya yang kokoh oleh warisan Orde Baru. *Ketiga*, seperti yang dijelaskan pada point pertama dan kedua, karena kepanjangan sistem sentralisme dan ditengah-tengah hujatan pada Orde Baru, Golkar yang telah merubah nama menjadi Partai Golkar dengan kekuatan sumber daya manusia dan materi yang ada pada organisasinya, masih mampu berbenah diri dengan konsep paradigma barunya. Salah satu perubahan yang paling penting adalah mengganti ideologi lama menjadi ideology baru yaitu yang disebut paradigma baru. Maka dengan inilah para aktivis atau masyarakat mulai tertarik untuk masuk menjadi kader partai tersebut, masuknya para pimpinan dan aktivis organisasi massa reformasi yang sebelumnya menghujat Golkar karena paradigma lama, bersama paradigma baru Partai Golkar gencar mensosialisasikannya saat kampanye Pemilu 1999. Straregi paradigma baru oleh Akbar Tandjung ini merupakan salah satu factor Partai Golkar mendulang suara pada Pemilu 1999 dan berhasil menempati kemenangan ke-dua setelah PDI-Perjuangan. Hasil perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 1999 membuat Partai Golkar mampu untuk *survive* dan tetap eksis sampai sekarang.

Daftar Pustaka

- Abbas. *Etika Politik Akbar Tandjung*. Yogyakarta: Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga. Universitas Islam Negeri. 2008.
- Alfian, M alfan. *Memenangkan Hati Rakyat : Golkar Dan Akbar Tandjung 1998-2004*. Jakarta : PT Bende Press. 2004.
- Ambardhi, Kuskrido. *Mengungkap Politik Kartel : Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta : Pustaka Gramedia. 2009
- Azwan, Rully Chairul. *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era : Dari Partai Hegemonik Ke Partai Berorientasi Pasar*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia. 2002.
- Bulkhin, Farchan. *Analisa Kekuatan politik di Indonesia*, Prisma. Jakarta: LP3ES.
- Daryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo. 1991.
- Djamaluddin, Dasman. *Moratorium Politik : Menuju Rekonsiliasi Nasional*. Jakarta : Golkar Press. 2003.
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka. 2012.
- Ed, M dan Nana Supriatna. *Perkembangan Masyarakat Indonesia*. Bandung : Penerbit Widjaja. 2009.
- Eriyanto. *Analisa Framing : Komunikasi Politik Melalui Media*. Yogyakarta. LKiS. 2005.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004.
- Gautama, Sidharta dan Aries Boedimo. *Moralitas Politik dan Pemerintahan Yang Bersih, Menurut Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, Emil Salim, Nurcholis Madjid*. Jakarta : Grafindo Persada. 1999.

- Gotschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Susanto. Jakarta : UI Press.1986.
- Gufron. *Peran Slamet Efendi Yusuf Dalam Pola Relasi NU Dan Golkar*. Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.2013.
- Imawan, Riswanda.*Menggugat Kemandirian Golkar*. Yogyakarta. Bigraf Publishing.1996.
- Kuntowijoyo..*Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng.1999.
- Mashad, Dhurorudin..*Menggugat Penguasa : Ngarso Ngumbar Angkoro*. Jakarta. Gelora Aksara Pratama.1999.
- Michael,Robert.*Partai Politik : Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.1984.
- Murtopo, Ali. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta : CSIS.1974
- Nasution, A.H.*Jalan Tengah ABRI*.Bandung: Mizan.2008
- Nishihara, M. *Golkar and the Indonesian Elections of 1971*. Jakarta : CSIS.1972.
- Novianto, KholidDKK..*Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi*.Jakarta : Sejati Pres. 2004
- Prasdi, Nanang Dwi DKK. *Golkar Retak*. Jakarta : Sembrani Aksara Putra. 1999
- Pratigny, Imam. *Ungkapan Sejarah : Lahirnya Golongan Karya, Perjanjian Menegakkan Kembali Negara Proklamasi 17-8-1945*. Jakarta : Yayasan Bhakti.1983.
- Reeve, David.*Golkar Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika*. Depok:. Komunitas Bambu.2013
- Ricklef, MC..*Sejarah Indoensia Modern 1200 – 2004*. Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi.2004

- Ridwan, M Deden dan Muhajirin. *Membangun Konsensus : Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandang*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2003
- Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indoensia : Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta : Rajawali Press.1986.
- Satria, Hari. *49 Tahun Mengenang Partai Komunis Indonesia*. Depok : Independ Pres.2009.
- Soon, Kang Young. *Antara Tradisi Dan Konflik : Kepolitikan Nahdhatul Ulama, 1984-1999*. Jakarta : Universitas Indonesia.2002
- Suryadinata, Leo. *Golkar dan Militer- Study Tentang Budaya Politik*. Jakarta : LP3ES.
- Tandjung, Akbar. 2008. *The Golkar way : Survival Partai Golkar di tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- WMK, Anwari..*Bukan Sekedar Kata : Perjalanan Politik Akbar Tandang*.Jakarta : Penerbit Khanata.2005

Surat Kabar dan Majalah.

- Gatra.“ Kenangan Meminang Pesantren”. “Adu Tafsir Khittah 1926”.” Sikap Politik Berbingkai Agama”. “Ulama Siapa Sampyan”.5 Maret 2001.
- Kompas.*Massa PDI Perjuangan Serbu Kampanye Golkar*. 3 April 1999.
- Kompas.*Pangdam Minta Akbar Pertimbangkan Temu Kader di Solo*. 13 April 1999.
- Kompas.*Golkar Tolak Negara Federal*, 1 Sepetember 1998.
- Kompas.*Akbar Minta Bukti Kepada Mahasiswa, Golkar Tidak Ragu Amandemen UUD'45*.12 Januari 1999.
- Republika, *Disayangkan Pengunduran Diri Pengurus Golkar*, 18 April 1999.
- Republika, *Paradigma Baru Proses Pengambilan Keputusan*. 6 April 1999.
- Republika, *Akbar: Jangan Serang Golkar Terus*, 2 Januari 1999.
- Republika, *Mengapa Golkar Dihujat*, 21 Mei 1999.

Republika, *Poster Kampanye Golkar*, 21Maret-21 Mei 1999.

Suara Karya. *Kantor GolkarDiserang Massa Liar*, 25 Mei 1999.

Suara Karya. *Poster Kampanye Golkar*.21 Maret-21 Mei 1999.

Tempo. Amien Rais : Lebih Bagus Kalau Kami Menjadi Watchdog. 21 Juni 1999.

Sumber Wawancara

Akbar Tandjung, Ketua Umum Golkar periode 1998-2003, tanggal 25 Agustus 2014

Musfihin Dahlan, MAntan Kader Golkar Departemen Kaderisasi dan Litbang Anggota, tanggal 20 Agustus 2014

Budi Harsono, Pensiunan ABRI, tanggal 21 Agustus 2014

Mahadi Sinambela, Mantan Sekjen Golkar Periode 1998-2003, tanggal 18 Agustus 2014

Hajriyanto M.Thohari, Wakil Ketua MPR RI Periode 2009-2014, tanggal 23 Agustus 2014

Ibrahim Ambong, Mantan Sekjen Golkar Periode 1998-2003, tanggal 21 Agustus 2014

Lampiran A. Foto

A.1



Keterangan: Foto bersama Muhadi Sanambela



A.2



Keterangan: Foto bersama Hajriyanto M. Thohari

A.3



Keterangan: Foto bersama Akbar Tanjung.



A. 4



Keterangan: Foto bersama Musfihin Dahlan

Lampiran B. Surat Keterangan dan Cuplikan Wawancara**B.1****SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami:

Nama : Mahadi Sinambela
Pekerjaan :Direktur Percetakan Media Merdeka
Alamat :
Umur :

Menerangkan bahwa saudara:

Nama : Mega Ayu Lestari
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Moch. Yasin No.47 Jember

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul
“Peran Akbar Tandjung Dalam Menyelamatkan Partai Golkar Pada Masa Krisis
Politik Pada Tahun 1998-1999”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

TTD

Mahadi Sinambela



Lampiran B.1.1

Hasil Wawancara

Saya diberikan kepercayaan untuk menjadi Wakil Sekjen kemudian saya diangkat menjadi DPP karena Adi Sasono selaku Ketua DPP sebelumnya mengundurkan diri mendirikan Partai Daulat. Kita bisa bertahan karena Pak Akbar merubah paradigma ini kemasyarakat. Awalnya Golkar belum partai politik ketika Munaslub, ada wacana ketika munas Golkar akan dijadikan sebuah partai bila tuntutan reformasi ini terpenuhi. Dan saya diberi peran pada saat itu hanya ke berbicara pada media-media seperti, Radio dan televise. Konsekwensi internal langkah-langkah Golkar dan Akbar selalu berkomunikasi dengan masyarakat untuk memahami bahwa tidak ada lagi hubungannya dengan soeharto atau Orde Baru dan masyarakat memahami itu. Amin Rais mengatakan, Golkar seperti kertas dilipat-lipat kelaut dan hilang, kita berkomunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Golkar, dan organisasi-organisasi yang pernah didirikan Pak Akbar. Untuk menjadi partai ketika itu kita sudah lengkap misalnya, kita mempunyai kantor-kantor di setiap daerah-daerah sedangkan partai lain masih belum, ada anggotanya ada pemimpinya, pengurus-pengurus kecamatan atau desa, komputer-komputer lama, sedangkan partai lain masih belum. Jadi yang menyelamatkan Partai Golkar adalah Akbar Tandjung segenap dengan seluruh jajarannya terus berkomunikasi kemasyarakatan di daerah-daerah sambil menyampaikan sosialisasinya mengenai paradigma barunya yang tidak lagi berkaitan dengan Orde Baru dan Soeharto.

B.2**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami:

Nama : Musfihin Dahlan
Pekerjaan : Mantan Pengurus Partai Golkar periode 1998-2003
Alamat :
Umur :

Menerangkan bahwa saudara:

Nama : Mega Ayu Lestari
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Moch. Yasin No.47 Jember

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul “Peran Akbar Tandjung Dalam Menyelamatkan Partai Golkar Pada Masa Krisis Politik Pada Tahun 1998-1999”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

TTD

Musfihin Dahlan

Lampiran B.2.1

Hasil Wawancara

Saya diberi peran oleh Akbar Tandjung pada masa itu masih anggota kader litbang, setelah itu saya dipercaya menjadi Sekjend Golkar pada reshuffle kedua kepengurusan Golkar pada masa Pak Akbar. Peran saya masa itu hanya disuruh menanggapi di media massa seperti di televisi khususnya dari pengamat politik dan juga hujatan politik dari lawan-lawan politik Golkar seperti PDI, PAN. Apa yang dilakukan oleh Akbar Tandjung pada saat itu adalah langkah yang tepat dengan merubah Golkar dari semua sistem yang masih melekat dengan Orde Baru atau Soeharto, yaitu tidak ada lagi yang namanya otoriter dalam menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan organisasi Golkar, Golkar dimulai dengan terpilihnya Akbar Tandjung setelah Munas maka kebijakan Golkar sekarang demokratis yang dimulai dari *button up* bukan *top down* lagi. Pasca reformasi kita sering mengalami hal-hal yang diskriminatif seperti pembakaran-pembakaran bendera-bendera Golkar, pembakaran kantor Golkar, terutama di DPP Golkar di Slipi yang terus di datangi massa. Mereka adalah massa yang selama Orde Baru dibungkam maka pasca reformasi mereka melampiaskannya ke Golkar.

Selain itu kesabaran dan kesantunan politik Akbar Tandjung yang tidak akan memungkinkan melakukan cara serupa. Akbar hanya mengatakan tidak akan balik menyerang atau balas dendam. Beberapa kecaman dan opini yang berusaha menghujat Golkar melalui media massa, Akbar Tandjung hanya mengatakan “Seharusnya ada sikap saling menghormati diantara para partai, dari pada saling mendiskreditkan partai lain, lebih baik mensosialisasikan visi, dan misi partai untuk masa depan Indonesia. Akbar Tandjung tahu bagaimana ia harus menggunakan politik jawa walaupun ia bukan orang jawa. Mungkin dengan kesabaran dan kesantunan Akbar Tandjung yang selalu dibaca di beberapa media massa membuat

simpati masyarakat, karena pembicaraan partai Golkar dalam media cetak harus di usahakan semenarik mungkin sehingga pembentukan opini publik dapat terbentuk dengan baik. Oleh karena itu media juga sangat berperan penting dalam pencitraan partai Golkar yang baru.

Golkar yang kuat pada masa Orde Baru dengan struktur yang kuat dan dilindungi oleh kekuasaan, pasca reformasi kita tidak lagi menggunakan hal itu karena Golkar pasca reformasi mengalami berbagai macam konflik, akan tetapi Akbar Tandjung memberi mereka kebebasan untuk memilih apa yang akan mereka lakukan pasca reformasi, seperti misalnya silahkan mendirikan partai politik, sesuai dengan landasan yang dipegang teguh paradigma baru Partai Golkar waktu itu. Untuk masalah pendanaan kita menggunakan sumbangsih para kader-kader Golkar, Pengusaha yang masih terikat dengan Golkar, dan inisiatif lainnya bagaimana nantinya kita bisa *survive*.

B.3**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami:

Nama : Ibrahim Ambong
Pekerjaan : Mantan Pengurus Partai Golkar periode 1998-2003
Alamat :
Umur :

Menerangkan bahwa saudara:

Nama : Mega Ayu Lestari
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Moch. Yasin No.47 Jember

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul "Peran Akbar Tandjung Dalam Menyelamatkan Partai Golkar Pada Masa Krisis Politik Pada Tahun 1998-1999"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

TTD

Ibrahim Ambong

Lampiran B.3.1**Hasil Wawancara**

Di Partai Golkar banyak sekali aktivis HMI, PMII, IMM, dan juga sedikitnya GMNI atau mereka yang dulunya ikut dalam kelompok Cipayung. Saya dan Akbar yang termasuk dalam KAHMI mengkonsolidasikan agenda ini, yaitu dimana kader Golkar misalnya yang memiliki komunikasi politik ke NU kita mempunyai Slamet Effendi Yusuf yang dulunya dia adalah aktivis PMII dan dekat dengan pengurus-pengurus NU, maka Akbar Tandjung dan Slamet Efendi Yusuf sama-sama berkunjung ke pesantren-pesantren dan tentunya pesantren itu adalah basis NU dan mungkin akan memilih PKB. Di Muhammadiyah misalnya kita memiliki Din Syamsudin yang dulunya adalah sama dari HMI tetapi masuk dalam organisasi Muhammadiyah dan menjadi kepengurusan pusat Muhammadiyah. Di sinilah Akbar Tandjung selain menggunakan rekrutmen mantan organisasinya, dia menggunakan jaringan komunikasi politik lainnya.

B.4**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini kami:

Nama : Akbar Tandjung
Pekerjaan : Direktur Akbar Tandjung Institute
Alamat : Jln. Pancoran Indah Raya, Komplek Ligamas Indah B No A-1
Perdatam, Jakarta
Umur :

Menerangkan bahwa saudara:

Nama : Mega Ayu Lestari
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Moch. Yasin No.47 Jember

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul "Peran Akbar Tandjung Dalam Menyelamatkan Partai Golkar Pada Masa Krisis Politik Pada Tahun 1998-1999"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

TTD

Akbar Tandjung

Lampiran B.4.1

Hasil Wawancara

Partai Golkar supaya bisa *survive* perlu membaaur atau adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Maka dari itu saya membuat paradigma itu, karena perubahan sistem politiknya berubah, sosial kemasyarakatan berubah, system pemerintahannya juga berubah, begitupun pula sistem organisasi Golkar harus berubah. Dari paradigam itu saya membuat Golkar harus sesuai dengan tuntutan reformasi juga pada masa itu, maka poin isi yang penting pertama dari paradigam baru itu berisi 1), paradigma kemandirian; Golkar harus bisa eksis, *survive*, dan mandiri berbeda pada masa orde baru, Golkar selalu lengkap dengan PNS dan TNI-nya atau yang disebut ABG. Dimana Golkar harus berusaha sendiri dengan sumber daya yang ada ketika masa itu. 2) paradigma demokrasi; mengelola sistem pemerintahan yang demokratis, dan organisasi yang demokratis, sistem pengelolaan politik yang demokratis, maka sayapun membangun dalam Golkar pun demokrasi artinya proses rekrutmen calon-calon yang akan menduduki berbagai jabatan politik harus demokratis, kita memakai yang disebut sistem button up bukan top down. 3) paradigma kerakyatan karena Golkar harus eksis dapat dukungan oleh rakyat, artinya Golkar harus mampu secara konsisten menampung aspirasi rakyat, agar Golkar dapat kembali dipercaya oleh rakyat.

Melakukan komunikasi antar internal partai sangat diperlukan karena saya terus memperkuat soliditas partai, memperkuat semangat mereka, memperkuat percaya diri mereka, terus memberi motivasi mereka, karena kalau ingin *survive* maka kita harus kuat dengan resiko yang ada. Pada saat itu banyak yang menghujat Golkar, karena kita semua menyadari Golkar merupakan bagian yang membesarkan Orde Baru. Sayapun memberi pemahaman kepada kader-kader Golkar di seluruh daerah untuk ikut bersama-sama memperkuat Golkar, dengan cara kemasyarakatan bila

memandang Golkar sekarang berbeda dengan yang dulu yaitu dengan paradigma baru itu. Untuk komunikasi politik yaitu saya berkomunikasi baik dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan diseluruh Indonesia baik itu di pusat maupun di daerah, dengan partai-partai politik lainnya saya berkomunikasi dengan baik juga, seperti PKS, PPP, PKB dan partai-partai yang lain pada saat itu.

